

## **TRANSKRIPSI DISKUSI BUKU HAK MINORITAS. MULTIKULTURALISME DAN DILEMA NEGARA BANGSA**

*Hotel Santika, 04 September 2007*

### **Sambutan Direktur Interseksi, Hikmat Budiman**

.....sebagian tidak terekam

.....

Isu ini menjadi sangat relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan pada siang hari ini yaitu tentang isu-isu minoritas. Dalam konteks itu pula multikulturalisme bukan jawaban tunggal. Jadi Interseksi berada pada posisi sedang mencari, sedang mendiskusikan, mengajak kita untuk membuka ulang karena itu hanya salah satu cara kita melihat persoalan. Disamping itu pada kesempatan hari ini kami juga ingin memberikan beberapa penghargaan. Selain kepada 4 pembicara, kebetulan salah satunya berhalangan hadir yaitu Bapak Ahmad Fedyani Saefudin, juga kepada saudara-saudara kami dari komunitas yang menjadi subyek penelitian. Dari sekitar sembilan komunitas yang pernah diteliti oleh teman-teman peneliti dari Interseksi, kami ingin mempersembahkan dua karya sederhana untuk teman-teman kami itu. Dan ini juga merupakan pestanya teman-teman dari Interseksi yang sudah bekerja keras. Dengan segala kelemahannya inilah hasil karya kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Penghargaan yang sangat besar kepada Yayasan TIFA yang telah mendukung Interseksi, bahkan sejak awal Interseksi berdiri, melalui beberapa program, juga kepada teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu di sini. Salah satu hal yang penting juga bagi teman-teman Interseksi, ini adalah proses untuk menuliskan gagasan, karena ternyata itu bukan proses yang mudah, cukup berdarah-darah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Bapak-Bapak/Ibu sekalian yang hadir disini juga untuk masyarakat yang lebih luas, penghargaan sangat besar kepada teman-teman Interseksi.

Sebetulnya saya ingin memperkenalkan mereka siang ini pada anda, tapi saya tidak terlalu yakin apakah siang ini mereka hadir semua, saya mungkin bisa sebutkan

teman-teman peneliti yang hadir, mungkin bisa berdiri disamping saya sekarang, karena saya betul-betul ingin menyampaikan penghargaan ini untuk mereka Mas Paring Waluyo, ini yang meneliti wilayah Tengger, kemudian Mbak Indri, ini adalah peneliti hukum kami, kemudian mas Amin Muzakir yang meneliti komunitas Ahmadiyah di Ciparay Cianjur, kemudian Uzair Fauzan kebetulan sedang melanjutkan studi di Belanda, Heru kebetulan berhalangan hadir pada siang ini, kemudian saya juga ingin Ridwan Al-Makassari bisa tampil kedepan, beliau yang menjadi koordinator penelitian Hak Minoritas tahun ini, dan mas M. Nurkhoiron yang menjadi salah satu editor dari buku ini, dan salah satu yang menjadi pengagas awal dari program penelitian hak-hak minoritas dan multikulturalisme ini. Saya ingin kita memberikan aplause yang baik untuk mereka sekalian.

Terima kasih banyak untuk teman-teman, jadi ini merupakan sebagian dari teman-teman penulis dan penelitinya. Kami di lingkungan Interseksi sedang terus mencoba memperbaiki diri, saya kira mungkin itu yang penting saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak anda semua, mudah-mudahan ini adalah langkah kecil kami untuk memberikan kontribusi sederhana bagi diskusi lebih kritis tentang multikulturalisme juga bagi upaya advokasi kita terhadap komunitas-komunitas minoritas bukan hanya yang ada di pulau Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Ini adalah saudara-saudara saya yang sudah mencurahkan semua kemampuannya sehingga buku ini bisa anda nikmati bersama. Terima kasih untuk Yayasan TIFA dan semua pembicara yang telah hadir disini, assalamualaikum, wr.wb.

## **MC**

Terima kasih untuk Mas Hikmat dan kawan-kawan dari tim peneliti yang sudah berdarah-darah untuk menyelesaikan buku 1&2, untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada perwakilan dari Yayasan TIFA Bapak Tri Nugroho, yangmana beliau sudah hadir diantara kita, kami persilahkan untuk memberikan satu atau lima patah kata.

## **Sambutan Direktur Eksekutif TIFA, Tri Nugroho**

Terima kasih, assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya atas nama Yayasan TIFA saya ingin ucapkan terima kasih banyak

kepada Bapak/Ibu sekalian atas kehadirannya pada peluncuran buku-buku yang menarik, dan yang kedua juga saya ucapkan selamat kepada Yayasan Interseksi yang telah membuat buku yang demikian cantik menurut saya pribadi, dengan topik yang sulit sebetulnya, tapi ini topik yang ditulis dengan gaya yang menarik dan bernas. Dan Yayasan TIFA saya sendiri sebetulnya tidak terlibat, karena saya baru 3 bulan di Yayasan TIFA. Renata, rekan saya di Yayasan TIFA yang banyak membantu atau banyak terlibat diskusi dengan Yayasan Interseksi dalam merumuskan atau mendorong upaya ini bisa terjadi.

TIFA ke depan sangat tertarik untuk mendukung kegiatan serupa, terkait dengan program pluralisme yang ada dalam program TIFA, dan kami sendiri sekaligus memperkenalkan bahwa tiga tahun kedepan Yayasan TIFA akan mendorong sebuah tema yaitu menuju konsolidasi demokrasi. Itu tema kita untuk tiga tahun ke depan, menjelang tahun 2009, 2008 sendiri mendorong upaya yang mengasah menuju pada konsolidasi demokrasi 2009-2010 dan setelahnya. Saya pikir buku ini adalah sumbangan yang cukup berarti dalam upaya yang tadi saya sebutkan. Terutama misalnya dalam buku yang pertama disebutkan pertanyaan mengenai demokrasi, itu silahkan dibaca, itu sesuai dengan diskusi yang ada dalam di TIFA sendiri, mengenai bagaimana hak minoritas dalam kerangka demokrasi di Indonesia, dan juga disebutkan bahwa hak-hak minoritas yang menurut beberapa pihak yang bergabung dalam AMAN misalnya jika mereka tidak diakui merekapun tidak mengakui negara semacam itupun muncul sebagai statemen politik dari teman-teman yang mengaku atau beraliansi sebuah organisasi AMAN. Diharapkan ke depan yayasan Tifa dan yayasan Interseksi bisa bekerja sama dan kita bisa menggabungkan antara mazhab Interseksi dengan konsolidasi demokrasi di Tifa mudah-mudahan kita bisa mencari sinerginya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan selamat bagi yayasan Interseksi....wassalamualaikum

## **MC**

Terimakasih kepada Bpk Tri Nugroho atas sambutannya yang cukup jelas dan mampu menyakinkan kita untuk membaca kedua buku tersebut sampai tuntas. Berikutnya adalah kami memberikan waktu lagi kepada Bapak Hikmat Budiman dan Bapak Nugroho untuk memberikan secara simbolik kepada 10 perwakilan dari para

undangan buku hasil kawan-kawan Intrseksi yang didukung sepenuhnya oleh yayasan TIFA. Kami persilahkan kepada Bapak Hikmat Budiman dan Bapak Nugroho.

Dan selanjutnya saya akan memanggil satu-persatu dari undangan untuk menuju kedepan untuk menerima buku tersebut.

1. Kami mohon kepada Bapak Ahmad Mulyadi dari Jemaah Ahmadiyah Ciparay supaya maju kedepan .
2. Ibu Rara dari Jurnal Perempuan kami mohon maju kedepan.
3. Bapak Setine dari Lembaga Huma
4. Ibu Yusni Jatim perwakilan PDII atau yang mewakili beliau
5. Ibu Adriana Elizabeth mewakili LIPI supaya maju depan
6. Bapak Hartoyo dari Lembaga Arus Pelangi
7. Bapak Bhatara dari Imparsial
8. Bapak Amin dari kontributor penulis buku
9. Perwakilan dari Depertemen Dalam Negeri Bapak Harry Saksono atau Bapak Edi
10. Ibu Rosmi Julitasari dari Human Right Radio
11. Ibu Nurul dari the Japan Foundation
12. Ibu Dina Muhidin perwakilan dari KOHATI HMI

Dimohon kepada panitia untuk membawakan bukunya untuk dibagikan kedepan. Kami persilahkan yang pertama kehormatan kami berikan kepada Bapak Nugroho dan kemudian Bapak Hikmat.

## **MC**

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian selamat menikmati kata-perkata dari kedua buku tersebut semoga membawa manfaat bagi para pembaca. Berikutnya tanpa berpanjang panjang lagi kami serahkan acara kepada moderator Bapak Tantan untuk memulai pembahasan buku kedua dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan menyebut nama atau hal-hal lain yang berkaitan pembukaan acara tersebut dan kami ucapkan selamat mengikuti.

## **Moderator**

Terimakasih

Assalamu'alaikum wr.wb (salam sejahtera untuk semua)

Hadirin sekalian setelah berpanjang-panjang kita mengikuti acara yang cukup seremoni, Kita akan mendiskusikan salah satu dari buku yang Ibu-Bapak sudah pegang, meskipun untuk tidak dibaca sekarang karena nanti akan mengganggu forum.

Satu diskusi yang kalau misalnya kita lihat dari judulnya “Hak Minoritas” itu merupakan tema keseharian. Misalnya ketika saya baru pertamakali lagi dari Bogor ke Jakarta naik tol dan setelah tengah malam naik jadi merasa dicekik saya merasa minoritas waktu itu. Tetapi kalau saya disuruh untuk menunaikan membayar kewajiban zakat saya merasa mayoritas yang tidak perlu untuk menunaikan hal itu. Jadi kadang-kadang kalau sebagai minoritas kita membicarakan banyak hak-hak sedangkan kalau berbicara tentang mayoritas kita banyak membicarakan kewajiban misalnya. Konglomerat itu bisa jadi sebagai minoritas konglomerat di Indonesia karena memang beberapa segelintir, tapi bagaimana mereka sedemikian menghisap sumberdaya kita yang notabene mayoritas, mereka tak mau peduli, itulah dilema hak minoritas dalam konteks Indonesia. Tapi mungkin dalam buku yang kedua yang akan kita diskusikan, kita tidak akan membahas hal-hal yang agak makro seperti itu, tapi kita bicara hak minoritas, yang betul-betul hak minoritas, yang defenisinya bisa anda baca dibuku pertama sebelumnya dikatakan editornya yaitu bung Hikmat, sangat dilematis tak kalah problematis dengan defenisi minoritas itu sendiri. Tapi yang paling penting dalam hal ini terlebih lagi bila kita bicara dalam konteks demokrasi, yang notabene salah satu dampak dari demokrasi adalah berkuasanya mayoritas. Waktu saya menyebarkan undangan dari forum Interseksi ke kawan-kawan saya beberapa orang agak tertawa. Saya bilang kenapa tertawa? Kata dia, yang mayoritas saja sudah berapa banyak haknya yang dipenuhi, sementara kita harus ngomong lagi yang minoritas. Saya bilang enggak apa-apa siapa tahu yang mayoritas sudah terpenuhi, yang minoritas juga kebagian dan kadang tidak terjadi sebaliknya.

OK... sebagai pengantar hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal yang sangat brilian dan kita sudah menghadirkan pembicara-pembicara yang tidak kalah berkualitas. Tapi sebelum forum ini kita mulai, mari kita menundukan kepala sejenak, karena salah satu pembicara yang sudah konsen hadir di sini, tidak bisa hadir

sehubungan dengan katanya sakit yang mendadak, saya pikir mari kita merundukkan kepala kita kira-kira sepuluh detik untuk mendoakan beliau untuk supaya bisa segera sembuh. Terimakasih...langsung saja pembicara yang pertama, beliau mewakili dua kenyataan: yang pertama beliau sebagai peneliti di Interseksi, tadi sudah dihadirkan didepan, tapi juga keseharian beliau ada di lembaga lain yaitu di ELSAM. Saya bacakan saja CV singkatnya. Nama Indriaswati Saptaningrum, panggilannya Indri saja. Lahir 8 Juni 1973, jadi masih sangat muda, dan sangat minoritas di depan ini. Ia menyelesaikan Master dari Inggris tahun 2005, sekarang ini aktif sebagai koordinator studi pada ELSAM Jakarta. Supaya tidak berpanjang-panjang kata, saya persilahkan kepada mbak Indri untuk mempresentasikan makalahnya.

### **Mbak Indri**

Terima kasih

Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama yang mau saya garisbawahi sebenarnya yang ingin saya sampaikan terutama lebih merupakan sebuah sharing atas pengalaman terlibat dalam proses penulisan dan penelitian bersama tim Interseksi. Karena terus terang ini merupakan pengalaman pertama kali bergabung dengan Interseksi sambil aku juga berkenalan dengan mereka yang nampaknya sudah lebih dulu masuk dalam sebuah kerja besar, untuk melakukan advokasi terhadap hak minoritas, yang seperti ditunjukkan dengan penerbitan buku sebelumnya. Terus saya juga berterima kasih bahwa diantara teman-teman saya diminta untuk mewakili tim Interseksi bukan untuk mewakili seluruh apa yang diuraikan yang ada dalam buku itu, tapi untuk lebih mencoba memberi ruang dan membicarakan mengenai beberapa versi yang kita peroleh selama dalam proses penulisan dan penelitian itu berlangsung. Khususnya secara lebih spesifik itu berkaitan dengan perbincangan mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan sistem hukum dan ketentuan hukum yang mungkin langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proses penelitian minoritisasi ataupun pelanggaran kondisi minoritas pada komunitas tertentu yang subjeknya ada yang diteliti dalam buku kedua itu. Nah saya sudah membuat sedikit oret-oretan/ catatan yang sebenarnya merupakan edisi singkat dari apa yang sudah saya coba tuangkan dalam buku itu.

Tetapi kurang lebih inilah intisari yang saya peroleh selama saya menyusun bersama teman Interseksi menyusun penelitian itu.

Dari segi hukum sebenarnya tugasnya cukup berat, karena dari sejak awal ada satu tugas yang dilandasi oleh sebuah kegelisahan. Kegelisahannya adalah sederhana yang kalau dirumuskan secara singkat kurang lebih ada dua hal yang berkaitan dengan hukum. *Pertama* apa sih peran hukum. Hukum di sini kita diskusikan waktu itu sebagai kalau mengikuti mainstream adalah produk perundang-undangan atau ketentuan hukum positif yang selama ini sebenarnya berperan atau berkontribusi terhadap kondisi minoritas atau kondisi minoritisasi kalau saya boleh koreksi. Lalu dari situ ada juga pertanyaan lain yang harus dijawab oleh peneliti hukum waktu itu, atau paling tidak dicoba digagas dalam penelitian ini, adalah lalu apa gagasan yang konstruktif berkaitan dengan kegelisahan itu yang bisa kita disumbangkan pada khalayak untuk mempunyai sebuah tata hukum, sistem hukum atau produk hukum yang lebih familiar terhadap perbedaan dan realitas bahwa negara bangsa ini terdiri dari berbagai kelompok-kelompok yang berbeda dan memiliki ciri-ciri dan karakter baik kultural sosial maupun identitas yang berbeda.

Kira-kira dua hal itu secara yang sederhana dicoba ditelusuri dan dialami untuk juga melanjutkan keprhatianan dari seri yang pertama dulu. Jadi buku kedua itu merupakan lanjutan dari proses pemetaan yang pertama. Yang Pertama dari perspektif hukum dulu dicoba diperkenalkan barangkali jawaban mujarabnya adalah sederet instrumen hak asasi manusia yang telah dicoba diratifikasi ataupun secara internasional diakui berlaku atau diakui keberadaannya, berlaku secara efektif pada masyarakat internasional. Itu bisa Bapak-Ibu sekalian kalau kebetulan pegang buku yang pertama ada di artikel terakhir yang berkaitan dengan persoalan hukum. Tapi kemudian di tahap yang kedua itu kegelisahan muncul karena apa, karena dari sekian banyak norma-norma positif yang waktu itu diuraikan dan ditulis sepertinya kondisinya tidak berjalan sebagaimana yang diidealkan. Artinya kalau dulu diharapkan bahwa keberadaan hukum-hukum positif dan normatif yang berspektif HAM yang dilakukan dengan cara mengadopsi secara langsung berbagai instrumen HAM dari tingkat internasional, itu bisa secara perlahan dan namun cepat menjawab kebutuhan-kebutuhan ditingkat lokal berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Tapi nampaknya tidak seperti itu. Jadi dari penelitian kita tahap kedua saya menemukan bahwa hampir semua kelompok seperti tadi kalau kita mendengar dari sambutan perwakilan TIFA beberapa bergabung misalnya kelompok Aman yang sangat terkenal mengadvokasi apa yang disebut hak masyarakat adat. Jadi berbagai kelompok yang memiliki identitas kultural yang berbeda di Indonesia saat ini secara riil berbondong-bondong sejak tahun paruh 80an dan mulai semakin besar tahun paruh 90an itu bergabung dengan berbagai isu-isu yang dimotori oleh *civil society* seperti misalnya Aman atau kelompok minoritas yang mencoba mengusung gagasan soal masyarakat adat dan hak minoritas.

Oleh karena itu pula dalam proses penulisan mengenai hukum, kita mencoba berawal dari pertanyaan singkat apakah betul fenomena yang selama ini muncul dengan menggunakan dua instrument itu atau dengan menggunakan kedua genre itu didalam proses advokasi untuk merebut hak-haknya kembali itu sudah tepat dan sudah memang pada galingnya seperti itu. Dari kajian kita dibagian hukum dalam penelitian ini kita menemukan bahwa ternyata dan itu diakhir masih proses perbincangan dengan katakanlah seperti misalnya dengan perwakilan kelompok masyarakat Towani Tolotang di Sulawesi. Beliau mengatakan saya pertama kali bahkan sejak Aman didirikan saya bergabung dan menggunakan gagasan itu dalam melakukan advokasi sampai ditingkat lokal tetapi tidak cuman itu pada saat yang sama beberapa saat yang lalu mereka kemudian juga bergerak dan mengusung gagasan soal minoritas. Jadi antara minoritas adanya masyarakat adat digunakan dan itu tidak cuma untuk komunitas Tolotang yang menggunakan secara kadang bersamaan kadang bergantian. Tapi dengan tujuan yang sama untuk mencoba memperoleh pengakuan terhadap identitas kulturalnya berhadapan dengan masyarakat pada umumnya.

Nah dari realitas itu kemudian kita bertanya sebenarnya jangan-jangan itu sebuah upaya yang dilakukan karena absennya atau ketiadaan kerangka hukum yang sebenarnya pas dan dibangun dari diskusi yang terbuka untuk melihat kebutuhan yang paling pas untuk realitas Indonesia seperti apa? Karena ketiadaan itu maka kreatifitas itu dimunculkan dengan mencoba mempergunakan segala bentuk even new yang ada termasuk dalam konteks ini masyarakat adat dan kelompok minoritas. Itulah

yang membuat kenapa misalnya kalau di buku itu dibagian hukum misalnya kita menuliskan berarti upaya untuk membangun kerangka hukum yang baik yang pas dengan realitas kita tidak juga melupakan hak asasi manusia, itu sebenarnya justru harus dibangun dengan merekonstruksi ulang atau setidaknya mempertanyakan ulang asumsi awal bahwa nampaknya instrumen masyarakat adat yang pas atau nampaknya instrumen minoritas yang pas untuk realitas Indonesia.

Dan dari temuan itu kita menemukan bahwa kajian historisnya mengatakan perkembangan pengaturan mengenai masyarakat adat itu sebenarnya kalau kita runtut bahkan dari jaman kolonial dia memiliki beberapa bias justru yang tidak berpihak kepada kelompok masyarakat adat sendiri. Misalnya Prof. Lef bilang kalau pembentukan konstruksi adat itu lebih untuk menjustifikasi dan melestarikan kepentingan intrest ekonomi, politik pemerintah kolonial dan anehnya justru itu yang kemudian dihidupkan pasca kolonial itu sendiri. Dan repotnya adalah ketika hari ini berkembang bersamaan dengan perkembangan ditingkat global yang terkenal dengan gerakan *indigenous people* yang kemudian secara mudah dia dikaitkan dengan isu dan pemahaman mengenai masyarakat adat. Sehingga kalau kita secara umum berbicara di kelompok-kelompok masyarakat sipil sudah jamak bahwa *indigenous people* itu diartikan dengan masyarakat adat, meskipun kalau kita lihat keduanya itu ada beberapa perbedaan yang mendasar terutama berkaitan dengan misalnya kalau kita ingin rigid berbicara tentang elemen-elemen didalamnya.

Karena itu kemudian ada satu tugas yang penting disini berkaitan dengan lalu seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang harus dibangun mengingat meskipun upaya perjuangan masyarakat sipil itu dibangun diatas kedua alas itu dan ternyata tidak tepat, upaya pemerintah dan negara sendiri yang mencoba menjadikan kelompok-kelompok masyarakat ini sebagai subyek yang dikenai oleh hukum-hukum negara itu tidak berhenti. Dari waktu ke waktu mereka terus dikenai dan menjadi subyek dari intrest yang berbeda-beda dimana hukum kemudian terutama hukum positif itu berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan negara lebih dari pada kepentingan kelompok-kelompok itu sendiri.

Misalnya pada era paruh 70an di situ saya catat kecenderungannya adalah semua hukum digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi kesuksesan gagasan pembangunanisme. Maka disitu kalau kita lihat ada beberapa produk misalnya,

produk mengenai kesejahteraan masyarakat terasing, kemudian komunitas adat tertinggal dan semuanya adalah ideologinya mencoba melakukan adjusmen terhadap kelompok itu supaya sesuai dengan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Setelah paruh 80an memang ada perbedaan kelompok-kelompok ini memang memiliki dan diakui, direcognisi sayangnya direcognisinya adalah sebagai lembaga adat yang dengan kata adat sendiri sudah memberikan **restriksi** misalnya dengan kata adat kelompok Ahmadiyah misalnya atau kelompok Tolotang itu sendiri di Sulawesi Selatan yang lebih bicara tentang identitas kultural dan religius itu tidak bisa masuk dalam kategori itu. Tapi pada paruh 80an ketika diakui rekognisi adanya lembaga adat itu lebih digunakan untuk tujuan lain yang adalah mencoba mengontrol dan mencoba melakukan pendisiplinan secara mental terhadap komunitas-komunitas yang ada. Sebenarnya pengakuan itu terus berkembang sampai sekarang dalam konteks ini. Tetapi sebenarnya kontrol itu lebih ditujukan untuk bicara soal khususnya kenapa adat berkaitan dengan kontrol atas akses pada tanah bersama yang pada saat yang sama bersilangan kepentingan dengan kepentingan negara berbicara soal ekonomi, politik dan sumber daya alam.

Pertentangan inilah yang kemudian tidak bisa oleh kelompok *civil society* dicoba digarap dengan masyarakat adat dan hak minoritas tapi ternyata 2 hal itu tidak bisa menjawab realitas misalnya komunitas Kaharingan yang sebenarnya saya bukan masyarakat adat atau dalam buku itu dalam studi kasus kelompok Parmalim saya sebenarnya bukan masyarakat adat atau komunitas Tolotang dia mengatakan sebenarnya dia tidak sesuai dengan definisi adat itu sendiri. Tetapi karena ketidakadaan even new ketiadaan instrumen yang lain maka dia mempergunakan yang ada dengan asumsi bahwa itu akan berkembang kemudian. Karena itu sebenarnya dari sini sudah jelas tugas utamanya adalah yang saya juga mau menggunakan untuk menutup apa yang saya sampaikan tugas utamanya justru dari pembuktian ketidaksesuaian dari apa upaya yang selama ini kita lakukan. Ada tugas besar yang harus dilakukan bersama-sama yaitu mendiskusikan secara bersama berangkat dari realitas keberbedaan itu kira-kira konstruksi hukum yang seperti apa yang harus dibuat. Memang betul tidak sepenuhnya yang dilakukan mengusung gagasan masyarakat adat dan kelompok minoritas itu salah, tetapi harus ada proses

rekonseptualisasi ulang untuk juga bisa mencakup beberapa hal yang lain yang selama ini sebenarnya gagal untuk dicakup disitu. Itu saja makasih

## **Moderator**

Paparan yang terus selalu mengundang pertanyaan, tetapi yang paling menarik ternyata research ini untuk buku satu diawali oleh keprihatinan dan buku kedua oleh kegelisahan mungkin buku ketiga kegembiraan kali ya.

Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mbak Indri itu memang harus dijawab bersama dan disini ada pembicara kedua mbak Thung Ju Lan. Saya disuguhi CV beliau tapi ini merupakan paper tersendiri dan kita harus seminar lagi. Jadi saya bacakan saja yang singkatnya aja.

Pertama namanya Thung Ju Lan, lahir di Jakarta 12 Mei 1958. Peneliti di LIPI. pendidikan terakhir di Australia 1998 dalam bidang sosiologi. Ada bebarapa kegiatan pengalaman 5 kali sampai sekarang, terus puluhan pengalaman penelitian disini ada 51 penelitian. Saya sebutkan emailnya nanti kalau mau mengkopi ini beliau bisa mengirim kepad anda. **[thungjulan@indo.ne.id](mailto:thungjulan@indo.ne.id)**.

Baik saya kira langsung saja ke mbak Thung untuk mempresentasikan makalah yang sudah beliau tulis yakni komentar terhadap buku hak minoritas multikulturalisme dan delima negara bangsa. Silahkan mbak..

## **Presentasi**

### **Thung Ju Lan**

Terimakasih saya senang membaca buku ini karena buku ini cukup membuat kita untuk berpikir. Tapi pada intinya yang saya tangkap sebenarnya lebih banyak berbicara tentang positioning atau repositioning yang dilakukan oleh kelompok agama minoritas yang dianggap agama minoritas terhadap negara dan kelompok agama lainnya. Saya melihat memang kita bisa belajar banyak tentang dilema hubungan minoritas dan mayoritas dari buku ini tentang bagaimana yang dikatakan minoritas terpinggirkan oleh negara, atau kelompok mayoritas dan kemudian ditawarkan konsep multikulturalisme dan demokrasi. Dan disinilah permasalahannya.

Saya belum membaca secara detail buku yang pertama tetapi dari yang saya tangkap apa yang dikemukakan oleh *reviewer* bahwa itu mencoba sebenarnya mencari model, sama seperti yang dikemukakan tadi oleh mbak Indri bahwa ingin mencari model yang sebenarnya, model hukum model multikulturalisme. Tapi mungkin kita perlu hati-hati dalam hal ini kalau saya akan mengatakan apakah multikulturalisme itu cocok untuk Indonesia? Apakah demokrasi itu cocok? Jadi kalau kita berangkat dalam pikiran itu mungkin kita akan bisa menggali sesuatu yang lebih mendasar persoalannya.

Nah ini terkait dengan pertanyaan yang dikemukakan sendiri oleh yayasan TIFA dalam pengantar ini terkait dengan persoalan bangsa. Makanya judulnya adalah multikulturalisme dan dilema negara bangsa. Walaupun saya tidak terlalu melihat dimana dilemanya secara nyata dikemukakan disini. Pertanyaan yang saya pikir menarik dan penting untuk dibawa kedepan adalah bagaimana kita mengenai kehidupan suatu bangsa kalau disuatu wilayah itu banyak bangsa menurut pertanyaan ini atau bagaimana paling tidak di suatu teritorial juga atau negara teritorial satu bangsa atau banyak bangsa diakui. Nah dan ini kemudian dikaitkan dengan minoritisasi, kemudian modernisasi dan perubahan seluruhnya dibahas dengan cukup baik di dalam buku ini.

Kenapa saya melihat bahwa ini sulit dikaitkan dengan multikulturalisme karena kalau kita perhatikan di Indonesia sebenarnya sejauh mana kita menyadari tentang tarik menarik antara modernitas dan tradisionalitas ini tidak banyak digali dalam berbagai studi seringkali itu dilakukan secara *given* kita anggap bahwa kita modern, negara saja kita anggap sesuatu yang *given*. Padahal dari cerita yang dikemukakan tarik menarik ini kencang sekali, kalau kita masih bisa melihat kencangnya ini akhirnya yang terjadi sering tertarik apakah kita memilih yang modern modernitas yang berlebihan atau kita kembali pada masa lalu seperti ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa kita harus menghidupkan kembali masyarakat adat. Pada hal kalau kita mengerti konsepnya dua persoalan ini saling jalan bersama. Maksudnya, apa yang disebut modernitas itu adalah perubahan sedangkan apa yang disebut tradisionalitas itu adalah kontinuitas.

Jadi sebenarnya setiap dalam permasalahan selalu berjalan bersama. Nah dalam kondisi seperti ini bagaimana kita harus menempatkan multikulturalisme atau

demokrasi. Apakah itu jawaban yang tepat? Mungkin sebelum kita mencari modelnya kita pertanyakan dulu apakah di Indonesia ini dengan kondisi yang sekarang apakah kita bisa hanya memilih salah satu, karena multikulturalisme atau demokrasi ini selalu dikaitkan dengan modernitas, jarang sekali bagaimana kaitannya dengan tradisionalitas yang di Indonesia ini masih cukup banyak kalau kita lihat di Indonesia bagian Timur dimana banyak hal-hal yang terkait dengan tradisi dengan kehidupan yang belum banyak berubah itu masih harus digali.

Nah kalau kita mencoba mengkaitkannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Interseksi terutama dengan kasus-kasus yang dibangun. Ini menarik bahwa akan coba untuk dibangun sesuatu dari bawah untuk menjawab hal itu. Tetapi kajian lapangan ini sebenarnya saya lihat tidak terlalu terlihat benang merah setiap kasus sehingga yang terjadi adalah kasus-kasus yang lepas, tapi saya senang sekali kalau kita melihat seperti ini nanti akan membangun sesuatu dari kenyataan yang ada cuman harus selalu dikembalikan kepada pertanyaan tentang tadi sehingga kita selalu melihat kaitannya dengan konsep. Saya melihat kasus yang di Tolotang itu menarik, saya tidak akan membicarakan dulu pengantar yang diberikan oleh M. Khoiron dan Ridwan al-Makassary kita kembali ke sana.

Saya mulai dengan kasus Tolotang, kasus Tolotang ini posisinya sangat jelas dan menarik hanya interpretasi dan analisis penulisnya itu kurang mendasar sehingga permasalahannya tidak jelas, misalnya dari seluruh asumsi itu sudah ada pemaksaan-pemaksaan, tetapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tolotang dengan negosiasinya di sinden itu bukan keterpaksaan tetapi pilihan. Kita harus bisa membedakan sehingga pada waktu kita menempatkan mereka dalam posisi sebagai kelompok minoritas kita jelas, kapan mereka punya kekuatan atau keinginan atau apaun untuk bernegosiasi dan dimana mereka benar-benar terpaksa, itu harus dibedakan sehingga nanti akan menentukan sekali strategi bagaimana kita menempatkan mereka dalam konteks yang lebih besar. Begitu juga kita perlu melihat misalnya waktu pandangan-pandangan orang **luar niat** misalnya struktur di dalam masyarakat tentang watak itu dikatakan menerima sesuatu sebagai pemerasan. Tapi kalau kita kembali memahami apa itu masyarakat tradisional, *leadership* mereka ada hubungan mutualistis yang sebenarnya sesuatu yang wajar kalau kita memahami konteksnya, jadi *continuitas* yang perlu diperhatikan disini.

Nah begitu juga kalau kita lihat di kasus Parmalim sebenarnya, menarik keinginan penulis untuk mencoba membahasnya dari *the conceived space*, *the lived peace*, *perceived space*, kemudian dikaitkan dengan *sacred space*. Tetapi sayang sekali saya lihat apa yang diberikan itu sama sekali tidak pulang pada konsep yang dikemukakan disini. Sehingga kita melihat bahwa kontribusinya yang semestinya bisa dibangun oleh penulis tentang nanti bagaimana dengan kaitannya dengan penataan ruang tidak terlihat.

Dalam penelitian tentang komunitas Tengger itu sudah terlihat sekali *literature review* nya sangat baik tetapi dari pemahaman itu sebenarnya ada konsep yang perlu ditarik tetapi karena tidak ditarik lagi dari *dictat review* yang terjadi akhirnya rancu. Saya mendapatkan kesan bahkan jadi akhirnya Islam disamakan dengan modernitas sedangkan Bhuda dan Hindu lebih tradisional. Ini sebenarnya dibenturkan begitu saja, banyak hal kalau kita mau lihat kembali kepada koin tentang tradisionalitas dengan modernitas itu ada koin yang sama, jadi bagaimana kita menanganinya ini dalam dua sisi ini itu nanti akan penting sekali kalau kita membangun kajian yang bisa membantu mereka khususnya untuk struktur hukum.

Kasus Ahmadiyah saya melihat hanya ini lebih banyak sebagai fenomena, sehingga saya mendapat kesan ini baru pada hal-hal tingkat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya eksklusifisme Ahmadiyah itu apakah karena doktrin atau karena strategi *observer* itu sama sekali tidak terlihat. Kemudian hubungan *patron-klient* dinyatakan begitu saja padahal bisa saja itu hanya hubungan antara seseorang yang datang menempati suatu daerah sebagai pendatang seperti memberi kontribusi tetapi belum terbangun hubungan *patron-klient* sehingga tidak kelihatan dimana proteksi yang diberikan oleh *patronnya*.

Dalam kaitannya ini saya akan kembali kepada apa yang dikatakan dalam pengantarnya. Pengantarnya ini memberikan kita satu hal yang membuat rancu untuk menarik benang merah yang kalau saya tangkap itu yang ingin dilakukan dengan kasus hukum dibelakang. Karena pengantar yang pertama oleh M. Nurkhoiron saya lihat lebih mencoba untuk mengkaitkan dengan buku pertama, melempar ide-ide kembali tentang apa itu, tetapi jauh kaitannya pada kasus di bawah.

Sedangkan pengantar yang kedua mencoba untuk menggiring memberikan pembukaan pada ke4 kasus itu, tetapi tidak terlalu menggiring kemana, sehingga

mendadak kajian hukum ditaruh di akhir. Sehingga saya tidak bisa melihat benang merah dari kasus itu ditaruh kemudian pada bagian hukum ini, tadi kita mendengarkan lebih jelas apa yang diinginkan oleh penulis tentang hukum ini. Yang secara simpel dikatakan untuk membangun pluralitas hukum tetapi kalau kita lihat sebenarnya disinilah persoalannya, apakah pengakuan itu harus dihukumkan, padahal tadi sudah dikatakan bahwa hukum itu rigid. Pengakuan itu tidak harus selalu kembali pada hukum, karena kita melihat tadi dua koin antara tradisionalitas dengan modernitas itu adalah perubahan. Dan ada fleksibilitas mengikuti perkembangan zaman, itu akan selalu ada dimana ada proses negosiasi setiap saat yang dilakukan oleh masyarakat menghadapi perubahan-perubahan. Jadi kalau hukumnya itu dirigidkan yang terjadi adalah kita membangun hukum yang sama seperti apa yang sudah dilakukan ini, akan selalu tempatnya itu menjadi tidak bisa juga bebas untuk kelompok tertentu. Jadi sewaktu-waktu akan ada kelompok yang diminoritaskan karena hukum itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah bukan mencari model struktur hukum tapi bisakah dia memberikan akomodasi dimana fleksibilitas itu ditempatkan. Jadi kita memerlukan hukum yang **bertintop** dalam arti pada tingkat lokal, biarkanlah internal struktur itu berkembang tetapi pada tingkat nasional ia dipayungi. Sehingga ada proteksi untuk hal-hal tertentu yang mempunyai kesamaan, misalnya kalau kita lihat di negara besar yang terkait dengan kriminalitas atau mungkin properti itu mungkin ditarik dari diskusi 4 kasus itu kita bisa melihat sejauh mana benang-benang merah mana yang harus proteksi dan dilindungi pada tingkat payung, tapi ia dibiarkan untuk bisa lebih berkembang. Saya harapkan dalam buku selanjutnya apa dilema kita sebagai negara bangsa mungkin akan lebih jelas terima kasih.

### **Moderator**

Terimakasih menambah pertanyaan jadi, setelah Mbak Indri mengajukan pertanyaan pertama Mbak Thung juga mengajukan pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan pembicara ketiga kita bisa sedikit banyak memberikan pertanyaan lain sekaligus jawabannya ya pak. ...ha...ha....

Pembicara ketiga kita semua sudah tahu, saya tidak usah membacakan CV-nya beliau, Bung Daniel Dhakidae, sudah sangat terkenal lahir di tahun 1945, di Indonesia Timur ya pak ya...P.hd dari Cornell University, salah satu universitas yang bergengsi untuk kajian Indonesia, salah satu hal mungkin yang patut digarisbawahi adalah ketika Mbak Indri berangkat dari berbagai kasus yang menjadi subjek kajian dari peneliti-peneliti Interseksi adalah ditarik ke level menengah oleh Mbak Tung dengan pandangan yang sangat sosiologis ia melihat problema hukum yang diajukan lebih dari tesis awal Mbak Indri, nah pada level Bung Daniel mudah-mudahan kita bisa menemukan satu benang merah yang oleh pengantarnya tidak ketemu katanya pak, nah mudah-mudahan kita menemukan benang merahnya dan sekaligus membangun pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya, nah sehingga kita akan semakin tajam memahami buku ini sekaligus juga memberi banyak masukan untuk membuat proposal baru bagi buku ke III, tadi Mbak Tung sudah memancing buku ketiganya apa saja dilemanya, karena kita sendiri juga belum tau apa saja dilemanya, terimakasih...saya pikir langsung saja Bung Daniel.

### **Daniel Dhakidae**

Terima kasih Bung moderator. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya perlu berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk penerbitan dua buku ini. Yaitu yang pertama tahun 2005 dan kedua tahun 2007. Kenapa, karena saya pikir sebetulnya yang harus menulis buku ini adalah tugas Republik Indonesia. Tapi ini dikerjakan oleh Interseksi. Jadi Yayasan Interseksi sudah mengambil alih fungsi Republik Indonesia, yang mungkin tidak mampu juga menerbitkan buku seperti ini. Kenapa saya ngomong begitu karena waktu Belanda menjajah Indonesia salah satu upaya yang sangat penting dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu, didirikannya apa yang dinamakan sebagai Leiden School of Antropology, atau dalam istilah Belandanya *lecherichting* (istilah Belanda—transkriptor) jadi aliran Leiden untuk antropology. Apa artinya itu, yaitu Belanda tidak mau menjajah Indonesia, kalau mau menjajah harus ada urusan akademia di sana, kalau mau menjajah harus ada satu pijakan intelektual di sana. Oleh karena itu, hampir semua pejabat-pejabat terutama sejak tahun 1864 semua dididik di Leiden dan di sana diajar tentang, satu

bahasa Indonesia, kedua sejarah Indonesia, ketiga, ilmu Bumi di Indonesia, keempat, Islam khusus di sana dan yang kelima hukum adat.

Nah saya akan menyinggung ini bahwa dengan begitu studi-studi Belanda masuk kedalam mentalitet Indonesia, masuk kedalam adat istiadatnya dan dari sanalah penjajahan itu dikendalikan. Karena itu kita akan tahu nama-nama seperti Snouck Hurgronje misalnya, kita kenal macam-macam lagi manusia-manusia yang memang muncul dari disiplin yang disebut sebagai *Indologi*. Di sana menarik bahwa yang dikerjakan Belanda pada tahun 1843 sebetulnya dengan aliran **Delve** sebuah kota kecil disana, tempat Habibie yang paling sibuk dengan **Delve** itu karena akademia teknologi sangat hebat di **Delve**. Jadi 1843 itu sudah di **Delve** tapi yang sangat terkenal di Leiden.

Semua Gubernur, calon-calon yang sekiranya akan menjadi Gubernur disini, yang akan menjadi Residen di sini semua dilatih di Leiden. Tahun 2005 ada pula di Jakarta ini lembaga yang berpikiran yang persis sama yaitu kalau Belanda untuk studi disana dikatakan sebagai **Fuldenconden** itu artinya ilmu bangsa-bangsa itu artinya studi Batak, studi Minahasa, studi Minangkabau, studi macam-macam untuk menaklukkan.

Di sini tahun 2005 tahun 2006 dan 2007 muncul aliran yang mirip-mirip dengan Leiden School ini, tetapi dengan tujuan yang begitu berbeda yaitu kalau Belanda mau mengenal alam pikiran Indonesia dari dalam-dalamnya untuk menguasai, semua penulis dan peneliti di Interseksi ini dengan tujuan *empowering* yaitu memberi pemberdayaan dari kaum-kaum minoritas yang dipilih disini ini. Kalau Belanda memang seluruh studi dibidang akademia ini, penelitian-penelitian dan seterusnya dimaksudkan juga untuk dominasi misalnya yaitu memasukkan ke suku-suku dan bangsa Indonesia ini kedalam satu sitem kosmopolitan penjajahan, disini justru untuk mencerahkan dalam arti membebaskan disebut suku ini dari taruhlah penjajahan mayoritas, penjajahan dari *central state*, dari Republik ini dan seterusnya. Dalam arti itu saya pikir memang seperti yang saya katakan tadi yaitu satu penghargaan yang sangat tinggi untuk pekerjaan seperti begini ini.

Sekarang baru kita masuk ke urusan kita untuk membahas buku-buku beginian ini yaitu apa yang disebut minoritas, tentu saja disini sudah dipersoalkan, tetapi sebelumnya saya mau lihat apa yang diteliti oleh para peneliti Interseksi.

Mereka semua muda-muda umur kira-kira 30an-35, ada yang baru tamat dari UGM minggu lalu, jadi belum tamat sudah menulis buku ini, jadi semua peneliti itu muda-muda.

Kalau kita lihat wilayah mana saja yang dipilih, kita lihat bahwa seluruhnya Indonesia bagian Barat, kenapa karena Kalimantan dan Sulawesi itu Indonesia Timur, kalau kita lihat dalam ilmu bumi itu keliru, karena Tanjung Priok dan Banjarmasin itu langsung satu garis. Baik dalam pengertian Belanda maupun dalam pengertian pembangunan Indonesia juga dalam segi pembagian waktu, waktu Indonesia tengah sebagian di Kalimantan itu, tapi mengenai waktu ada soal lain untuk membicarakan tentang waktu, kenapa Indonesia dibagi menjadi tiga dan seterusnya itu tapi urusan lainnya, tapi yang mau saya katakan disini yaitu sebagian besarnya adalah barat dan sangat ajaib juga bahwa Sulawesi mendapat tempat paling tinggi disini ini, kira-kira ada empat penelitian yang ada di Sulawesi, Kalimantan hanya satu, seluruh Sumatra hanya satu, Jawa ada tiga, Indonesia Timur kalau tidak diwakili oleh Lombok, praktis kosong Indonesia timur yang artinya Bali ketimur kalau sekiranya Sulawesi tidak masuk, itu tidak diwakili Indonesia timur, jadi semuanya kesini, nah pertanyaannya yaitu apa yang dibayangkan dengan minoritas, kenapa? Karena persoalan minoritas dimanapun hari ini, yaitu tahun 2007, bulan ini, hari ini, persoalan minoritas hampir menjadi persoalan diseluruh dunia, yang saya ambil contohnya saja Belanda, yaitu negara yang pernah menjajah kita, justru karena Belanda pernah menjajah kita, saya periksa Belanda dengan baca koran-koran Belanda dari hari ke hari di internet, nah apa yang terjadi di Belanda, sebagaimana kita lihat dimana nuansa yang namanya minoritas yaitu Islam di Belanda.

Islam di Belanda menjadi persoalan sekarang ini, dulu tidak kenapa waktu sebelumnya tidak..karena, datang sebagai buruh pekerja dan seterusnya pekerja gelap, pekerja terang tetapi sekarang tiba-tiba menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan yaitu menjadi warga Islam dari Maroko, Islam dari al-Jazair dan Islam dari berbagai tempat lain menjadi warga disana, pertanyaannya adalah apa bisa atau boleh orang Maroko, orang Al-Jazair, Islam menjadi warga Belanda. Itu pertanyaan yang hampir tidak bisa dijawab di sana dengan pandangan minoritas. Islam di Belanda itu bagian dari **Netherland schooldier** katakan oh bukan karena yang menjadi Belanda ada satu **white** dua kristen, karena itu tidak mungkin orang-orang ini menjadi warga

Belanda. Dan kalau perlu al-quran dilarang di Belanda. Dan semuanya bukan saya omong kosong dari kepala semuanya bisa dibaca di **Delfoztran 9** agustus 2007 dan juga bisa dibaca dari **Delfoztran 15 Juli 2007**. Nah sekarang baru kita lihat, minoritas Islam di Belanda dan minoritas dari buku ini sama atau berbeda? Nah disini saya pikir titik-titik yang sangat perlu dijawab yaitu meskipun menurut saya ini ada satu sangat berbeda kenapa karena minoritas Islam di Belanda yaitu Islam yang mempunyai satu kesatuan dogmatik di seluruh dunia, dengan apa yaitu dasar dari agama samawi yaitu agama yang berdasarkan al-kitab. Sedangkan di sini sama sekali bukan yaitu bagian-bagian yang **scudit** terpisah kalau perlu dipisahkan, ada inti-inti kecilnya pun dianggap tidak ada yaitu contoh terbaik adalah Ahmadiyah. Satu kitab satu kepercayaan, satu ini satu itu, tapi No. *You don't to belong to us* karena itu Ahmadiyah ini harus disingkirkan kalau perlu dikucilkan dari bangsa ini, kalau perlu disuruh cari negara yang lain. Kalau perlu jangan tinggal di komunitas tetapi di camp tahanan dan seluruh Republik ini membiarkan camp tahanan itu terjadi atau dibangun di Lombok dan di tempat lain.

Nah Satingse sedramatik itulah sebetulnya yang namanya yang disebut sebagai minoritas. Dari buku ini yaitu pemisahan yang total baik secara sosial, ekonomi dan juga hukum. Terus yang kedua kalau kita ngomong tentang minoritas Islam di Eropa dalam hal ini ngomong lagi Belanda yaitu mereka mendapatkan semacam *International Support* dan itu kelihatan sangat jelas waktu peristiwa dulu di Norwegia yang peristiwa buku pelajaran di sekolah itu. Nah saya pikir yang kita ngomong di sini ini dalam 2 buku ini oriented tidak punya kontak apapun dengan dunia di luar selain dunianya sendiri yaitu dunia Tengger, dunia Parmalim, dunia dari semua yang diteliti disini. Atau 9 wilayah yang diteliti di dua buku itu, saya pikir dengan ini baru kita memahami sekurang-kurang kita mencoba yang disebut sebagai konsep minoritas itu. Karena kalau kita tidak lihat seperti itu akhirnya kita bilang seluruh Indonesia minoritas pada dasarnya, satu-satunya mayoritas hanya Jawa. Kenapa degan 120 juta orang Jawa dan macam-macam lain apalagi Flores itu apalagi minoritas. Untuk saya ini tetapi tidak pernah dikepala saya, saya menganggap diri saya sebagai minoritas sejak saya lahir sampai hari ini. Saya lahir di Flores sebagai orang Flores agama katolik mayoritas, dari mana asal minoritas? Dan seterusnya saya di didik disana sampai hari ini tidak ada minority kompleks di kepala saya ini. Tentu

saja bisa dijelaskan tetapi maksud saya yaitu ketika ngomong tentang minoritas ini adalah **sludit society** yang dari tadi mbak Indri sudah merecognition (pengakuan) orang seperti **Banitidey** di luar pengakuan. Dan karena itu kalau sekiranya saya membandingkan School of Interseksi ini dengan School of Leiden kira-kira dalam arti itu, yaitu satu *for the seek of Domination* yang ini *for the seek of empowerment*. Kira-kira di sana itu bagaimana kita menilai atau melihat yang namanya minoritas.

Bagian terakhir dari komentar saya ini yaitu kalau sekiranya memang ini minoritas dalam arti yang sangat serius. Keseriusan minoritas ini saya belum baca semua tapi yang langsung menarik perhatian saya 1 Tengger 2 Parmalim, dua ini langsung menarik perhatian saya dan saya baca paling pertama. Selain karena beberapa konsep yang dikemukakan disana, tetapi yang kita lihat disini adalah terutama di Tengger dan Parmalim itu seperti apa Orde Baru itu berusaha secara sangat sistematis untuk penaklukan Tengger supaya sadar vabia Tengger begitu juga Parmalim di Sumatera Utara., sangat sistematis sebagaimana yang dikemukakan oleh para peneliti di sini untuk apa untuk menyadari bahwa dia Parmalim dan dia tidak masuk dalam kategori agama apapun, dia tidak dilindungi dan tidak boleh dilindungi oleh Departemen Agama. Saya pikir disinilah sebetulnya kalau kita membaca buku ini adalah salah satu yang memang *inside* dari sini adalah *seclution* dan tidak mendapat *recognition* dari manapun dan semuanya dikerjakan dengan sangat sistematis, secara birokratik didalam Orde Baru.

Nah sekarang saya akan mengomentari bagian ketiga yaitu bagaimana menyelesaikan, bagaimana memandang persoalan-persoalan minoritas. Nah disini baru saya bilang lihat ini School of Interseksi ini untuk berlawanan dengan Leiden School of Antrophology. Saya pikir beberapa penulis pengantar dan beberapa penulis dari dua buku ini baik jilid I maupun jilid II sangat bagus memahami persoalan ini. Dimana kebagusannya yaitu dibedakan betul plurality dan pluralisme, plurality yaitu pluralitas yaitu bahwa Indonesia 300 suku 350an bahasa dan menurut saya kalau sekiranya suku dan bahasa dan agama menjadi satu ada 300 agama di Indonesia ini. Kenapa harus menjadi 5 waktu Orde Baru kenapa harus jadi 7 sekarang .jangan-jangan ada 300 agama yang berhak hidup di sini. Dan kenapa tidak diberikan hak hidup itu? Tetapi itu urusan plurality.

Tetapi waktu kita mengatakan pluralisme, pluralisme adalah *concern*, pluralisme adalah *decision*. Pluralisme adalah *political decision* untuk seperti apa melihat yang disebut sebagai minoritas-minoritas yang dengan didramatisasi oleh buku ini dengan apa yang mbak Tung tadi tidak terlalu senang dengan istilah itu “Minoritisasi” dalam arti bahwa anda ini minoritas, harus sadar bahwa anda ini terkucil, harus sadar bahwa ini tidak diinginkan oleh mayoritas. Dan kekuasaan negara itulah mayoritas yang sesungguhnya. Karena itu ada sebagai agama Parmalim tidak dikehendaki. Tetapi kita lihat di sini ada foto yang sangat menarik yaitu KTP di Medan agama Parmalim, saya senang betul melihat KTP itu, ini orang yang punya harga diri untuk mengatakan bahwa agamanya itu bukan Protestan, bukan ini bukan Islam bukan itu tapi Parmalim. Dan disinilah sangat menarik perhatian saya foto KTP ini. Dan itu foto KTP tahun 1989. tahun 1989 Soeharto lagi kencangkencangnya Departemen Agama seperti Departemen penjaga doktrin seperti tinggalnya di Madinah, tahu segala-galanya menguasai segala-galanya sampai terkecil tapi lolos juga agama Parmalim. Dan itu yang paling saya senang dari buku ini KTP itu, nah sekarang kalau memang para penulis pengantar mengatakan begitu plurality dan pluralisme seperti apa itu kita memperlakukan yang disebut sebagai minoritas itu. Yaitu menurut saya tidak ada satu pendekatan lain dari satu pendekatan bahwa ini adalah *citizen* adalah warga negara adalah warga Republik. Yang sama itu di Belanda tadi yaitu di sini ini dia bilang tidak boleh melihat Islam di Belanda sesuatu yang asing. Islam di Belanda harus dilihat sebagai bagian dari **Netherland Schooldier**. Ini omongan koran Juli dan Agustus bukan 2000 tahu yang lalu di zaman kolonial bukan, Belanda di tahun 2007 yaitu bahwa Islam di Belanda harus dilihat sebagai bagian dari **Netherland Schooldier** yaitu kebudayaan **Belanda**.

Karena apa? karena kalau sekiranya dulu Belanda dianggap waktu itu adalah **Judeo Christian** sekarang tentu saja sudah terjadi pergeseran-pergeseran. Karena itu Islam harus diterima di Belanda menjadi bagian dari kultur Belanda itu pertama. Kedua bagaimana memperlakukan orang-orang Islam di Belanda. Orang-orang Islam di Belanda menurut para politisi di sana harus dilihat bukan sebagai orang asing tetapi harus dilihat sebagai *Citizen*. Seperti apa melihat minoritas di sini saya pikir tidak ada suatu cara lainpun melihatnya sebagai *Citizen* yaitu warga. Kenapa.. mereka adalah warga dari satu Republik. Karena itu ketika ada camp tahanan di

Mataram atau di Lombok di sana terhadap Ahmadiyah misalnya, how came..? ada camp tahanan di tengah Republik, dimana polisi? Dimana Tentara Nasional Indonesia, dimana Departemen apa ? bahwa ada camp tahanan di Republik Indonesia tahun 2007 di salah satu pulau disana. Saya pikir inilah kira-kira tantangan yaitu bahwa *plurality is a fact* tapi pluralisme adalah *political decision* yang menuntut satu *political action* dari pihak Republik yaitu kita inilah Republik itu. Dan karena itu saya pikir tidak ada salahnya untuk mengatakan bahwa inilah Interseksi School of Anthropology. Dari Interseksi untuk melihat kembali Leiden School of Anthropology pada abad 19. Dan dengan ini saya pikir saya berhenti saja untuk diskusi lebih lanjut mengenai 2 buku yang pasti sangat berharga dan saya tidak mengerti bahwa para peneliti muda ini sejauh apa menyadari bahwa ini buku sangat historik untuk 10 tahun mendatang untuk 20 tahun mendatang apalagi 50 tahun mendatang. Makasih

### **Moderator**

Terimakasih, benar asumsi awal saya bahwa akan banyak pertanyaan yang sekaligus memberikan jawabannya, sehingga mempermudah kawan-kawan Interseksi untuk merumuskan jadi proposal mempermudah kepada TIFA untuk menyetujui research lanjutan untuk buku ketiga. Yang kedua apresiasi yang sangat tinggi kepada Interseksi bahwa sampai bung Daniel menyebutkan Interseksi hampir mengalih tugas Republik, tetapi saya yakin Interseksi bukan Republik tersendiri yang berdiri dalam negara Indonesia dan dia masih tetap sangat rasionalis meskipun sangat *concern* dengan hak-hak minoritas.

Ok Saudara-saudara sekalian di forum ini banyak pihak banyak kalangan menurut saya sangap patut didengar pandangannya baik itu berupa tanggapan maupun pertanyaan. Tetapi sebelumnya saya mengundang kepada Bapak MM Billah untuk memberikan sharing kepada kita mengenai persoalan yang kita angkat disini, kemudian yang kedua saya mengundang kepada mas Paring Waluyo yang telah melakukan research cukup mendalam yang disalah satunya telah kita buka untuk memberikan sharing juga kepada kita mengenai Tengger. Saya pikir itu dua dulu sebelum nanti saya buka dengan termin pertanyaan.

## **Mas Paring Waluyo**

Sorry..saya kebetulan lagi berbicara dengan Pak Billah. Saya datang kesini tidak sendirian, saya datang bersama 40 orang korban Lapindo yang kebetulan saya tempatkan di salah satu teman, yang kemarin melakukan aksi-aksi di Jakarta. Saya mau ajak ke sini semua saya takutnya Interseksi gak nampung ini.

Saya sebetulnya masuk ke Tengger sejak tahun awal 2000 dan karena proses masuk saya kesana diawali dari kegembaran saya untuk naik gunung dan berinteraksi dengan masyarakat disana. Lalu banyak melihat fenomena yang menarik karena salah satu pintu masuk saya kesana setiap tahun pasti akan digelar ritual Kasada sejak tahun 1992 dipopulerkan oleh Orde Baru, sehingga hampir setiap hari itu ada turis asing dalam negeri maupun mancanegara yang datang kesana sebagai bagian dari obyek pariwisata yang tidak hanya orang Tenggernya lahan gunung Bromonya itu tetapi orang Tenggernya sendiri.

Ritual Kasada baru dilaksanakan tanggal 26 Agustus kemarin, jadi mohon maaf para dukun-dukun Tengger tidak bisa hadir ke sini karena memang mereka harus menjalani tahapan ritual yang memang belum selesai dan itu tidak masuk dalam kategorisasi agama Hindu. Mereka menyebutkannya ritul-ritual seperti itu bagian dari adat dan ritual-ritual seperti tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Pura sebagai situs formal agama yang diakui oleh negara. Dan itu semaraknya luarbiasa. KeTenggeran seperti itu tidak hanya mengundang minat kepercayaan dari orang-orang Tengger disini wong jauh disana orang-orang di Malang, Lumajang yang sebetulnya setiap hari mereka menganut agama Islam itu juga mereka ikut merayakan ritual Kasada itu di Gunung Bromo mulai jam 9 malam sampai pagi dini hari matahari terbit dan itu dinginnya minta ampun luarbiasa.

Yang pasti menurut saya dalam melihat Tengger tidak bisa segegabah Hefner, karena saya melihat Hefner melihat Tengger dari kejauhan sehingga perlu warnanya yang semarak itu tidak nampak agak cenderung generalisasi dalam melihat Tengger, padahal dalam setiap desa di Tengger yang dipegang otoritas budayanya oleh dukun ini memiliki identitas, memiliki karakter, memiliki bentuk-bentuk kepercayaan yang bisa jadi berbeda dengan desa-desa lain walaupun semuanya semuanya dikatakan

dalam kosmologi gunung Bromo, gunung Bromo menjadi iman yang paling kuat bagi orang-orang Tengger untuk mengintegrasikan diri, termasuk bahkan desa-desa Tengger yang mayoritas penduduknya sudah memeluk Islam, tapi belakangan memang mulai muncul gerakan verifikasi agama, terutama Islam sehingga rumusan ketegangan-ketegangan baru kalau keTenggeran dan Islam masih dibiarkan seperti tempo yang lalu, maka ini akan mengganggu posisi keimanan maka akan terjadi posisi saling tidak mengenakkan antara Islam dan Tengger, tapi ini tidak terjadi di semua desa makanya saya lebih mengatakan ini hanya **disperclist** saya tidak berani membangun kategori yang general sebagaimana yang diutarakan oleh Hefner yang dikajian modernisasi di awal itu, maka dari itu kajian saya berangkat dari Hefner itu, karena saya melihat justru riset yang dilakukan oleh Hefner ini sebetulnya riset ma'mum output risetnya Tengger selama ini. Karena saya dalam membongkar-bongkar riset tentang Tengger ini yang dilakukan oleh orang Indonesia tidak cukup menemukan mahakarya prodian seperti yang lakukan oleh Tengger atau oleh orang Indonesia seperti pak Ayu Sutarto yang sebetulnya itu disertasi dari UI yang sayangnya masih dalam polemik tentang mitos, yaitu cerita legenda-legenda rakyat dikumpulin yang seolah tidak ada jejak apapun, untuk apa legenda rakyat itu di ceritakan kembali tetapi versus Inggrisnya tidak diletakkan kembali dalam konteks seperti apa sehingga layaknya orang berdongeng , layaknya orang Tengger berdongeng dikumpulkan kembali, nah itu yang membuat keprihatinan saya, karena luarbiasanya Orde Baru ini membangun sistem pendudukan itu sehingga orang Tengger pun tak kalah canggih walaupun dengan sistem yang sangat minimalis mereka mulai bersiasat, ketika orang-orang Tengger di Pasuruan pada tahun 1965 itu dihabisi oleh kelompok-kelompok Islam mulai ada ketegangan-ketegangan awal misalkan soal tanah, sesat dan tidak sesat, sampai digambar-gambarkan dalam bukunya kanal-kanal di Pasuruan itu penuh sesak dengan mayat manusia diantara mayat-mayat di kanal itu adalah mayat-mayat orang Tengger dari wilayah Pasuruan nah ketika itu menjadi fenomena seperti itu, tapi orang-orang Tengger di Probolinggo menyikapinya dengan diplomatis.

ketika orde Baru mulai berkuasa dan konsolidasi kekuasaan masuk di struktur desa maka, terjadi keterbelahan dari orang-orang Tengger sendiri. Jadi kelompok-kelompok Tengger yang dekat dengan struktur birokrasi artinya ia dekat dengan

secara geografis dengan kota-kota kecamatan maka dukun-dukun mulai merapatkan diri ke Orde Baru untuk survive, karena kalau ia masih mempertahankan keTenggerannya sebelum Orde Baru merumuskannya sebagai pemeluk agama Hindu maka mengalami kasus di Pasuruan itu dan itu tidak diinginkan lagi. Akhirnya awal 60an dukun-dukun Tengger rapat tidak ada kata sepakat, misalkan dukun-dukun yang dari Malang mengatakan kami akan tetap akan mempergunakan kepercayaan kami, kenapa itu bisa bertahan karena Tengger yang masuk pada sisi wilayah kabupaten Malang secara geografis sangat sulit terjangkau. Sekarang ini dijamin yang sudah modern, bermacam-macam alat transportasi yang sangat luar biasa kemajuannya kalau masuk kesana tidak ada transportasi. Oleh karena itu kemampuan orang Tengger dalam menyikapi modernisasi dalam hal ini dalam hal ini agama dan kekuasaan orde Baru disikapi.

Saya akan mengambil kasus kisah orang Tengger yang menyikapi modernisasi dengan cara bernegosiasi dia menerima Golkar, dia menerima agama formal diantaranya Hindu. Tapi sisi yang lain tidak menerima hal itu. Itu yang terjadi. Konsekuensinya kadangkala ritual-ritual Tengger dilaksanakan dengan cara dalam tempo yang berbeda, ini yang hakekat keterbelahan ketidaksepakatan dukun-sukun tadi. Kenapa kelompok dukun yang lain menerima dan yang lain tidak? Karena juga realistis dengan menerima Orde Baru, dia menjadi DPRD dari fraksi karya pembangunan waktu itu, maka pembangunan masuk kesana dibuktikan ketika Tengger disisi dukunnya menjadi anggota Golkar dan anggota DPRD maka pembangunan masuk, maka tahun 73 itu sudah dibangun pompa air yang mengalir seluruh kawasan perladangan di Tengger termasuk saluran air bersih, termasuk juga instalasi listrik. Nah disisi yang lain tidak bahkan di kota kecamatan Mude belum dibangun listrik..disana di atas gunung sudah ada listriknya. Nah ini luarbisa dengan Golkar.

Sementara dikelompok yang tidak mau akses transportasinya sulit, jalannya rusak jadi benar-benar terisolasi. Sebetulnya banyak cerita mungkin waktunya saya akan sharingkan dengan kawan-kawan yang lain. Terimakasih

**Moderator**

Saya pikir kita juga banyak waktu nanti untuk mendengarkan kembali. Tapi ada banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh flor, saya pikir silahkan Bapak dan Ibu, tolong sebutkan nama, dari mana dan kalau ditujukan kepada siapa tolong disebutkan.

## **Sesi Diskusi**

### **Rozi (Pusat Penelitian Politik, LIPI)**

Sebenarnya tadi bung Daniel mengatakan Interseksi sendirian misalnya mengelola isu ini, kami di LIPI tahun 80an ada tim nasionalisme, sekarang dibangun lagi tim nasionalisme dan demokrasi concernnya mungkin sama pak ya kita melihat dilema negara bangsa ketika kita ingin ada Bhineka Tunggal Ika tapi yang terjadi sebaliknya. Itu konsen yang menurut kita dilematis sekali.

Yang kedua saya mengalami pengalaman empiris saya ketemu dengan pemeluk Parmalim di Medan dia mengatakan cara bagaimana sih kami tidak menjadi minoritas? Versi dia bisa gak KTP yang ada di Indonesia ini tidak perlu mencantumkan agama dan suku katanya. Dengan begitu semua orang menjadi Indonesia tidak lagi kalau ada seleksi dokumen orang langsung terdeskriminasi oh karena orang ini agamanya ini oh sukunya ini, jadi proyek membangun Indonesia kedepan menurut orang Parmalim yang saya temui, bisa nggak DepDagRI membuka wacana ini. Karena untuk menjadi Indonesia kan bukan hal yang gampang, kita lihat dengan represi selama ini hasilnya apa kita diambang perpecahan. Memang perlu komparasi apakah di negara-negara lain di ID Cardnya syarat mencantumkan agama dan suku itu menjadi buruk kalau nggak ada?. Apakah negara yang tidak mencantumkan agama dan suku adalah salah? Toh kalau ternyata pencantuman agama dan suku telah menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas kenapa kita gak dekonstruksi itu? Kita konstruksial baru Indonesia kedepam menjadi masyarakat multikultural dari menghilangkan identitas agama dan suku di KTP kita agar orang tidak merasa menjadi minoritas.

Yang ketiga ini agak teoritis saya ketemu Prof. Sengkot Marzuki dia membuat satu riset ada temuan yang menarik, karena selama ini orang mengacu pembela HAM dengan deklarasi Universal of Human Right, hasil temuan Prof. Sengkot

menunjukkan bahwa semua warga dunia ini kalau dititik zamannya dari pihak Ibu maka mereka berasal dari Ibu pertama manusia, jadi konsepnya adalah bila seseorang menyakiti orang lain apalagi membunuh orang itu menyakiti dirinya dan membunuh dirinya sendiri. Jadi ketika melakukan tindakan diskriminatif kepada orang yang berbeda agama dan beda suku sama halnya kita melakukan itu kepada diri kita sendiri. Jadi konseptual yang dibangun kemudian saya lihat apa yang ditemukan oleh Prof. Sengkot dkk kemudian menjadi Universal Declaration of Human Genon tahun 1992, itu bisa memperkuat perjuangan kita mengatakan bahwa suatu warga besar big family kita kembali keasal-usul manusia, sehingga sekat-sekat agama, suku itu tidak menjadi relevan lagi. Inilah trend menurut saya trend yang konstruksifis yang kita harus perkuat. Kalau kita lihat tetangga kita Malaysia, mereka punya Slogan “Bersekutu menambah mutu” Singapura “Majulah berssma Singapura” kita lihat dengan Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” kita trendnya Bhinekanya berbedanya tapi kalau Malaysia bersekutunya, kalau Singapura majulah bersama, kita lihat negara terdekat ini memiliki problem yang sama mereka plural tapi kita lihat praktiknya menarik. Singapura membolehkan partai lokal sehigga orang-orang kadezen bisa bikin partai kadezen punya wakil di tingkat sabah dan serawak dan dia bisa positioning terhadap kebijakan-kebijakan publik seperti apa yang dikatakan oleh mbak Indri tadi hukum-hukum yang diskriminatif tidak dibuat karena orang-orang minoritas bisa masuk terwakili di panggung politik lokal. Era otonomi daerah memerlukan partai lokal yang bisa mewakili kelompok-kelompok minoritas untuk bisa masuk kesana. Selama ada partai nasional yang kecil-kecil akan terpinggir. Itu point saya masih.

### **Muhammad Wahyudin (Hizbut Tahrir Indoensia)**

Pertama saya belum baca buku ini dari narasumber tadi Pak Daniel kita pernah ketemu Bapak di hotel Sultan waktu acara peluncuran buku Prof. An-naim. Menarik tadi tentang pluralisme dan pluralitas. Persoalannya di negeri ini sebenarnya begini.. kalau berbicara tentang agama secara hukum, politik ekonomi, budaya kita ini minoritas. Baik itu Islam,Hindu, Budha, Kristen, kenapa? Secara ekonomi misalnya.

Jadi betul-betul minoritas negeri kita ini dalam perspektif ekonomi, sehingga kekayaan alam kita dari sabang sampai merauke justru dinikmati oleh negara asing Amerika dan sekutunya itu yang terjadi. Dalam segi hukum misalnya di Indonesia diterapkan hukum Islam tidak diterapkan hukum Belanda, hukum penjajah pak Daniel yang tadi secara realistas di Belanda juga masuk berpikir Puritan, kenapa dia melarang orang Islam menjadi warga negara Belanda, karena bukan kulturnya, seperti Kristen dan sebagainya. Bahkan dia melarang Al-quran dan sebagainya, artinya saya melihat disini persoalan sebenarnya persoalan kesejahteraan persoalan rakyat mayoritas, minoritas. Ketika rakyat Indonesia tidak sejahtera sebenarnya bukan persoalan mayoritas minoritas tetapi justru ketika imperialisme berjalan di negeri ini, Belanda boleh lepas dari Indonesia, Jepang dan sebagainya. Tapi sekarang faktanya negeri ini tidak berdaulat secara ekonomi bahkan secara politik. Sehingga menurut saya penelitian dari Interseksi menurut saya ini begitu membanggakan mas, secara politik, ekonomi global, secara ideologi mungkin jelas, karena ternyata ideologi di dunia adalah kapitalis, liberal. Ini yang kemudian menjadikan negeri ini kacau, negeri ini tidak mampu lagi mensejahterakan rakyatnya.

Yang kedua, lantas kalau begitu bagaimana? Sebenarnya persoalan agama pak Daniel ya, ini sengaja dibenturkan dengan pluralisme tadi, bahwa agama itu sama dan sebagainya agar sebenarnya kapitalisme ini ingin menjadi agama dunia. Ini harus hati-hati . jadi memang mereka ingin menjadikan kapitalisme ini menjadi agama dunia. Siapa penganut agama apa saja tetapi anda harus menerapkan sistem kapitalis liberal ini dalam aset politik, ekonomi dan sebagainya. Ini persaingan sebenarnya, sehingga seolah-olah di Indonesia sekalipun kemudian pemilik kebijakannya beragama Islam tetapi sebenarnya secara politik , secara ekonomi ini tidak menerapkan Islam secara kaffah. Sehingga dalam satu hadis mengatakan seperti ini ”barang siapa menyakiti orang selain muslim maka sama seperti menyakiti diriku” jadi tidak ada kemudian menyakiti orang Nasrani, orang yang berlain agama. Rasulullah mengajarkan seperti itu, persoalannya ini kan persoalan ketika Islam tidak diterapkan di negeri ini, sehingga kemudian banyak kebijakan politik, ekonomi yang seolah-olah itu secara Islam atau tidak, saya cerita sedikit saja tentang kemarin acara ulama senusantara, saya hadir dan saya ikut di komisi ekonomi. Mereka merekomendasikan:

1. Pemerintah Indonesia harus menyetop, jadi ulama se Nusantara Indonesia membayar bunga hutang. 30% APBN kita itu dibayar hutang, ini luar biasa.
2. Seluruh aset-aset negara atau kepemilikan umum air misalnya, hutan dan tambang itu adalah milik rakyat dalam pandangan Islam. Maka harus dikembalikan kepada negara dan diberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dan itu saya katakan bertentangan dengan satu hadis, "rakyat itu memiliki tiga hal air, hutan dan energy". Sehingga Freeport, Cepu dan sebagainya harus diambil alih pak. Tidak boleh pak, Amerika tidak boleh menguasai disini itu harus dikembalikan kepada negara dan diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Terimakasih.

Nama

.....

Saya tidak baca buku ini semua, tetapi kebetulan saya tadi sedikit baca tentang Parmalim, dan kebetulan saya orang Medan. Saya cuman mau nanya, seperti mbak Indri tadi sampaikan tentang konsep hukum misalnya dilihat dari konteks minoritas, saya melihat buku ini bagaimana melihat dari perspektif perempuan. Apakah kalau misalnya konsepnya seperti ini ada hukum atau kebijakan kalau tidak melihat persoalan-persoalan perempuan atau kelompok-kelompok marginal yang lainnya yang dialami. Dalam kelompok minoritas itu itu mereka kan sebenarnya akan membawa kesejahteraan bagi semuanya. Misalnya saya ambil contoh adat Batak, adat Batak itu perempuan tidak boleh melakukan ritual-ritual keagamaan, keadatan walaupun Parmalim. Misalnya seorang laki-laki yang tidak menikah di dalam Batak itu tidak boleh melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan adat mereka, termasuk didalam Parmalim.

Saya adalah termasuk kelompok **al-genity**, bagaimana kelompok **al-genity** di adat Batak itu apabila seorang laki-laki gay dan tidak menikah, dia tidak samasekali tidak punya akses. Jadi moniritas itu harus selalu ada seperti mbak Thung sampaikan tadi, sepertinya jeruk-makan jeruk selalu gitu minorits makan miouritas. Jadi saya pernah ketemu sama seseorang kelompok Ahmadiyah, dia kagum dengan Gusdur tapi dia tidak kagum dengan Musdah, karena Musdah mendukung dan menolak poligami. Jadi saya melihatnya bagaimana Ahmadiyah melihat persoalan perempuan dilihat

dari kontek kelompok Ahmadiyah. Saya senang juga di forum ini ada HTI, tadi dari HTI mengatakan masalah ekonomi, bagaimana misalnya kelompok kami di HTI, kami akan tertindas juga dan termarginal? Jadi saya heran kenapa kelompok minoritas selalu memarginalkan kelompok itu sendiri. Saya pikir hal itu perlu diperhatikan kalau melihat hal minoritas ini, harus tajam didalamnya. Perempuan dan kelompok-kelompok marginal didalamnya itu selalu akan menjadi minoritas lagi.

### **Tanggapan/ Jawaban**

#### **Moderator**

Saya kira kita dengar tanggapan atau jawaban dulu saya mulai dari MbK Thung

#### **Thung**

Menarik sekali, sebenarnya kalau kita lihat seperti Pak Daniel bilang kita harus lebih jelas minoritas itu dari sudut perspektifnya 2 ya, sering kali karena tujuannya tadi seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi empowerment. Jadi selalu dari minoritasnya, tapi padahal kalau mencari solusi itu harus dari dua belah pihak, karena hubungan itu tidak selalu setiap hari itu saya selalu mayoritas besok juga saya mayoritas, dan terkadang bergantian tergantung kasus apanya. Nah itu yang saya bilang tadi bahwa hukum itu tidak bisa rigid, kalau rigid yang terjadi adalah hanya pembalikan, permintaan masyarakat adat dihukumkan, itu yang sedang kita meneliti misalnya di Maluku, bagaimana itu kembali ke negeri, yang terjadi disana seperti tadi dikatakan perempuan tidak punya hak suara yang ada semua struktur adat itu semua laki-laki, ini yang menyebabkan kita harus jelas dulu konteksnya adalah pada pola hubungan, pola hubungan seperti apa yang mau kita katakan tidak adil, apakah itu tidak adil karena satu orang punya power lebih besar satu lebih kecil? power ini harus hati-hati maksud power di sini maksudnya power negara sebetulnya, jadi kalau kita kembalikan ini pada konteks hubungan dengan negara, siapa yang duduk di negara itu? Apakah dia membuat apa tadi Pak Daniel bilang ini adalah *political decision*, *political concern*, nah harus berangkat dari situ, nah apa yang kita tidak boleh dalam arti

political concern ini terlalu memaksakan pada yang lain, ini yang menyebabkan saya melihat penelitian ini coba di analisis lebih dalam lagi. Tolong dilihat konsep-konsep, terutama ini yang sering sekali saya mendengarkan itu, konsep-konsep itu dipakai secara acak, secara seenaknya saja, sehingga akhirnya menjadi kita tidak bisa turun kepada basicnya.

Sebenarnya Indri sudah mengemukakan antara adat minoritas berbeda, tapi itu sering kali tumpang tindih, nah yang paling sulit bagi pengambil kebijaksanaan adalah tumpang tindih. Tapi kalau kasus itu kita kemukakan secara lebih rinci, yang terjadi kita bisa melihat dimana tumpang tindihnya, dimana celahnya, kasus yang dilakukan baik Ahmadiyah, Tolotang dan sebagainya itu kita cenderung melihatnya itu kalau dijahatin negara tapi jahatnya itu pada waktu kapan nah itu langsung jahat semua. Pada hal gak juga, karena gak ada victim pasif itu persoalannya, dia selalu punya negosiasi. Cara dia membentuk satu komunitas sendiri itu juga ada pilihan, jadi kayak misalnya kita mengatakan kasus konflik Dayak Madura dalam hal itu siapa mayoritas dan siapa minoritas, jadi rancu kan dayak merasa minoritas secara nasional, orang Madura mengatakan dia ditindas dia yang minoritas. Nah ini persoalannya tidak sesederhana ini karena ada tirani mayoritas ada juga tirani minoritas, jadi kita pilah yang baik-baik itu secara teliti, baru kita menentukan inilah yang tidak boleh, ini yang boleh dalam kerangka tertentu.

Nah kembali tadi kita selalu kemukakan tentang kaitannya dengan agama lalu apa yang paling berbahaya dari hubungan etnis dan agama adalah kalau kita berbicara tentang doktrin atau ideologi tertentu. Yang saya maksud doktrin atau ideologi tertentu itu adalah kecendrungan agama etnisitasnya apa itu mereka punya versi kebenaran dari versi mereka. Nah ini seringkali peneliti itu kurang menggali kesana, makanya saya tadi bilang dalam kasus misalnya di Tengger membenturkan Islam yang modern lalu yang Budho dengan Hindu itu tradisionalis, itu adalah kita membawa ideologi kita. Itu yang peneliti harus coba kritikel dalam hal ini. Dua-duanya adalah satu gerakan yang lumrah kalau kita melihatnya secara kehidupan masyarakat, dimana yang tidak boleh, yang tidak boleh adalah mungkin klaim Tengger mengatakan dia adalah yang absolut lalu Hindu mengatakan absolut atau Islam mengatakan absolut, tidak ada yang absolut di dunia ini. Jadi keabsolutan yang harus kita bicarakan untuk tidak ada. Karena dalam setiap situasi selalu ada

perubahan, setiap hari berganti, dalam setiap masa berganti dan berbeda orang berganti. Jadi mungkin titik intinya adalah melihat ketika satu kelompok mengatakan itulah absolut, itulah yang terbenar itu baru kita mengatakan itu salah, bagaimana itu supaya tidak diabsolutkan supaya yang lain bisa masuk, itu hanya sekedar sementara komentar saya mungkin dari yang lain ada. Terimakasih.

## **Indri**

Makasih saya hanya sedikit menambahkan, yang pertama soal perempuan mungkin nanti bisa ditanyakan langsung memang didalam riset itu kebetulan sejauh kita diskusi bersama memang tidak ditunjukkan secara khusus untuk membuat satu kajian khusus tentang perempuan. Tapi tidak juga berarti tidak ada ruang soal concern atas soal hukum ataupun sistem norma yang sangat tidak ramah akan merugikan perempuan, karena misalnya di situ saya tulis khusus berbicara soal hukum itu, kalau saya berbicara hak asasi itu proyek yang belum selesai yang artinya dia harus direkonseptualisasi ulang dengan memberikan ruang pada lokalitasnya. Itu bukan berarti kita menjustifikasi terhadap kecenderungan partikularitas, yang mengatakan bahwa kita bukan universal itu sesuatu yang khusus dan karenanya bisa dijustifikasi. Dalam praktik itu ditujukan untuk mensubyekkan perempuan pada sebuah aturan dan norma tertentu. Misalnya, disitu saya kutip soal praktik **genitamutilation** yang menjadi coment atas nama adat di beberapa negara di Afrika. Dan ketika ada gagasan soal norma hak asasi sebagai sebuah standar baru yang dicoba untuk diperkenalkan ditolak dengan gagasan partikularisme Afrika misalnya, dia mengatakan ada sesuatu yang khusus bicara soal hak asasi Afrika dibandingkan dengan yang lain atau Asia pada saat kita mencoba menggugat praktik tirani yang muncul pada rezim yang terdahulu. Jadi, ada disitu memang tapi porsinya tidak secara khusus diekspresikan dan diartikulasikan secara tersendiri.

Berbicara soal hukum, itu sebenarnya semangat yang kita coba terutama saya yang kebagian untuk meneliti itu, itu semangat yang kita coba bangun dengan Interseksi ini, bahwa hak asasi itu harus berhenti dipersepsikan sebagai sebuah proyek yang tuntas, sebagai sebuah aturan norma yang seperti dikatakan ibu Thung sebuah norma yang rigid dan berhenti sebagai sebuah hukum positif, dia harus selalu

direkonseptualisasi ulang, dia harus dipersepsikan sebagai sebuah sesuatu yang tidak mati dan tidak selesai, karena itu paradigma hukumnya juga harus diganti. Kita harus mencoba meretas kecenderungan yang kita mewarisinya dari Belanda dan terus sampai sekarang dan juga diperkuat oleh proyek besar modernitas bahwa hukum itu sesuatu yang obyektif, metodologinya scientifik, dan dia harus selalu positif. Karena dengan alasan bahwa dia harus untuk kemaslahatn orang banyak, maka dia harus mengusung yang namanya kepastian hukum. Satu orang sama untuk semua, itu yang kemudian disembunyikan dan justru sebenarnya menjadi tirani baru yang justru kemudian melanggengkan praktik dan selalu memunculkan struktur mayoritas dan minoritas, karena hukum sebagai sebuah rezim ia sangat legitimid sekarang. Kalau kita mau jujur tidak ada funding yang birokrasi di negara dunia ketiga yang tidak mencantumkan keharusan untuk melakukan apa yang namanya *legal reform*, yang artinya paradigmanya adalah bahwa ada satu tata aturan positif yang satu adalah berlaku untuk semua, itu yang kita coba direkontruksi dengan Interseksi dan mudah-mudahan ini jadi ruangnya terbuka dan membuka diskusi lebih lanjut.

### **Moderator**

Untuk Pak Daniel ada dua tanggapan dari Mas Roji dari Pusat Penelitian Politik dan kedua dari Bapak M Wahidudin dari HTI.

### **Bung Daniel**

Baik yang kedua dari bung Wahiduddin ini, saya ketemu bung Wahiduddin ini di Hotel Sultan pintar sekali berbahasa Arab, berdiskusi tentang kolonialisme dan imperialisme seluruhnya dalam bahasa Arab. Dan saya sangat mengagumi bung Wahiduddin ini, bahasa Arabnya luar biasa. Saya belum pernah melihat orang ngomong Imperialisme dan kolonialisme dalam bahasa Arab, dan yang dilayaninya adalah Prof. Ahmed An-naim dari Emory University AS,

Saya kagum juga anda ini Marksis berpikir, waktu di Sultan saya kagum bahasa Arabmu, waktu disini saya kagum Marksis dalam berpikir. Tetapi kira-kira begini bung Wahiduddin, kalau teman-teman disini menulis tentang minoritas dan macam-macam tentu saja bisa dilihat dari sisi kapital, misalnya disini ngomong

tentang Dayak umpamanya, hutan di Kalimantan adalah culture waktu dia menjadi logging disana menjadi kapital, tapi hutan adalah culture tempat dimana orang Dayak itu pertama hidup dia menggunakan kehidupannya rumah dari rotan ini, rotan pakaian dan seterusnya dia menjadi culture, tetapi waktu menjadi logging apalagi ilegal logging dia menjadi kapital. Nah, persoalannya yaitu dengan melihat dari sisi minoritas sebetulnya juga akan dipersoalkan pada satu titik tentang kapital, yaitu kapital yang memang berurusan langsung dengan culture dari masyarakat tempat itu, kenapa, karena hutan adalah bagian hidupnya, kali adalah bagian dari hidupnya. Sekarang seluruh Kalimantan itu kering di musim kemarau dan tidak pernah terjadi kapanpun dan inilah semua yang lagi dibicarakan ini adalah hubungan kaum minoritas itu dengan pertama culture dan kedua adalah kapital. Tinggal bagaimana mengontrol kapital itu demi kepentingan umum yaitu kepentingan minoritas. Minoritaskan nama kita atau negara atau ilmu dia memberikan nama minoritas, orang Dayak dia pikir saya penduduk, saya pemilik, saya pemilik ini. Gak ada itu kan kategori yang diberikan oleh orang luar, oleh peneliti atau apapun namanya, orang Dayak tidak paham itu minoritas, dia mayoritas dia pemilik, asli. Kapital yang menjadi soal waktu dia menjadi logging, apalagi dia menjadi ilegal logging. Terimakasih

### **Moderator**

Kita buka termin selanjutnya tapi sebelumnya saya dapat pesan dari sponsor untuk meminta satu ulasan khusus dari bapak MM Billah karena selama ini beliau cukup concern cukup berkecimpung dalam masalah ini.

### **MM Billah**

Terimakasih bung moderator, Jadi saya kayak orang minoritas dipaksa supaya berbicara. Ada beberapa hal yang pertama, ketika kita berbicara tentang minoritas maka orang sangat mudah terperangkap pada defenisi yang berbeda tentang istilah atau konsep yang sama, sehingga harus diperjelas dulu, makanya tadi ada minoritas

dari segi kapital dikait-kaitkan dengan neoliberalisme dan kapitalisme dan seterusnya. Oleh karena itu, saya terus terang saya belum baca buku ini dan saya sepakat dengan pembicara tadi, apa yang diartikan dengan minoritas itu harus cukup jelas itu punya implikasi yang jelas pula.

Ada yang menarik tadi adri mbk Tjung, itu satu kreteria yang menarik untuk melihat minoritas, yaitu ada interaksi dan relasi, jadi minoritas biasanya dalam interaksi dan relasi itu dia diperlakukan sebagai yang punya posisi terpinggir atau yang punya kekuasaan yang kecil, nah itu bisa terjadi misalnya kayak contohnya bung Daniel tadi di Belanda. Komunitas muslim di sana lebih kecil dengan masyarakat Belanda secara keseluruhan. Oleh karena itu diberi label minoritas. Contoh yang menarik tadi antara Dayak dan Madura, mana yang minoritas dan mana yang mayoritas?.

Kemudian pada tingkat level yang lebih tinggi pada tingkat bangsa misalnya, mana yang mayoritas dan mana yang minoritas? Hal ini menjadi lebih penting untuk melakukan kajian-kajian dan juga menarik kesimpulan-kesimpulan dari kajian itu, kalau kriteria jelas misalnya apakah dalam interaksi seseorang posisinya dipinggirkan?, dan kekuasaannya diperkecil? Dalam relasi-relasi juga begitu ada relasi yang terpinggirkan misalnya, maka kita akan bisa menganalisisnya lebih cermat.

Yang kedua berkaitan dengan nampaknya yang mau disorot oleh penulis buku ini dikaitkan dengan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia memang seharusnya tidak ada hak mayoritas dan hak minoritas, tetapi toh dieksplisitkan itu, ada hak-hak minoritas jadi kelompok-kelompok minoritas itu haknya perlu ditonjolkan, kalau ada hak asasi manusia pertanyaannya kenapa hak perempuan dan kenapa ada hak anak misalnya, nah nalarnya sama seperti minoritas. Kalau hak perempuan itu ditonjolkan karena secara historis dan empiris perempuan banyak diperlakukan banyak tidak sama harkat dan martabatnya dengan laki-laki, meskipun secara normatif diperlakukan sama. Masalahnya hak perempuan itu perlu diangkat sendiri perlu ditonjolkan dan perlu diperjuangkan, oleh karena itu isunya adalah isu persamaan kalau dalam hak perempuan, kalau anak,-anak itu dianggap belum dewasa akalnya, emosional dan seterusnya. Oleh karena itu isu mengapa hak anak itu perlu ditonjolkan adalah isu perlindungan. Nah sekarang hak minoritas kenapa ditonjolkan dalam hak asasi manusia? Pada praktiknya mereka yang diperlakukan sebagai

minoritas itu selalu entah ditindas secara politik, meskipun secara ekonomi dia berkuasa misalnya, lihat saja hubungan antar etnis terutama etnis Tionghoa di Indonesia, etnis Tionghoa itu minoritas dalam arti jumlah, tetapi sering kemudian dibilang minoritas yang berkuasa secara ekonomi, karena penguasaan modal cukup banyak, jadi sekali lagi minoritas didalam banyak masyarakat itu selalu dipinggirkan dan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, aktifitas ekonominya juga digeser, aktifitas sosial juga begitu, apalagi aktifitas keagamaan. Yang minoritas secara agama bisa secara ekonomi menguasai, secara kapitalis juga menguasai. Sebagai individu sebagai warga negara semua orang dihadapan negara itu sama, dihadapan hukum itu sama, apakah agamanya berbeda, apakah warna kulitnya berbeda atau etnisnya berbeda itu tidak menjadi penting.

Yang ketiga adalah berkaitan karena judul bukunya adalah Hak Minoritas Multikulturalisme dan Delima Negara Bangsa. Jadi disini memang pergulatan masih terjadi meskipun sering kali manifes tidak ada, pernah ada yang mengatakan dulu bahwa kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia itu merupakan puncak dari kebudayaan-kebudayaan lokal, kebudayaan etnis misalnya, tapi kemudian dikritik, kalau begitu berarti kebudayaan nasional Indonesia itu punya jenjang hirarki yang lebih tinggi dari kebudayaan lokal, benarkan begitu? Bukankah korupsi misalnya karena menjadi kebudayaan nasional misalnya itu dan seterusnya bisa ditanyakan seperti itu, jadi konsep kebudayaan bangsa dengan etnis itu juga masih tarik-menarik sampai sekarang, maka isu atau masalah negara kesatuan yang pembelanya mati-matian, sekarang TNI dengan negara federal sebenarnya masih laten. Isu otonomi daerah itu muncul. Bhineka Tunggal Ika itu sebenarnya kontrak, karen berbagai macam etnis yang ada itu diakui keragamannya, bangsa itu tidak menghilangkan. Waktu Orde Baru bangsa Indonesia ini dianggap jenjangnya lebih tinggi kekuasaanya lebih tinggi sehingga bahasa Indonesia makin tinggi dan bahasa lokal semakin tidak mendapatkan tempat, bahkan surat kabar bahasa Jawa itu hanya di daerah keraton dan menyebar semangat itu di Jawa Timur, nah ini persoalan masih sangat terbuka, jadi yang disebut minoritas di Indonesia ini mana? Apakah Aceh, apakah Madura tahu Dayak satu yang lain-lain. Kalau sudah kita persoalannya sudah mendomistikasikan hak asasi manusia menjadi hukum di Indonesia, bebarapa sudah diratifikasi ya, tetapi dari segi isi hukumnya belum, masih perlu dilakukan domestikasi, jadi semua ayat-ayat itu

peraturan-peraturan UU yang berlawanan dengan hak asasi manusia seharusnya itu searahkan, kalau itu terjadi maka hak minoritas dan hak mayoritas tidak ada lagi. Tetapi selama hukumnya belum semua combine dengan hak asasi manusia, maka praktik memperlakukan kelompok tertentu sebagai minoritas itu akan tetap ada.

Terakhir, soal KTP pencantuman soal agama dan suku itupun bisa dilihat dari dua sisi, kalau orang sudah **dibranded** kayak bung Daniel tadi, sebenarnya meskipun bisa dicantukan misalnya suku Jawa, agama Islam misalnya, saya tidak perlu kemudian minder karena kejawaannya. Jadi identitas dalam KTP itu diperlakukan sebagai salah satu kriteria untuk mengambil keputusan didalam bidang misalnya bidang pekerjaan, atau bidang publik yang lain itu tidak boleh itu tidak boleh, itu terjadi diskriminasi sehingga identitas dari segi ini sah dan bisa dipertahankan, kemudian di Indonesia dipaksakan, sehingga kalau agamanya tidak agama Parmalim itu orang disebut itu menjadi minder itu salah sebetulnya, harus punya martabat, saya beragama ini dengan keyakinan saya oleh karena itu saya tidak minder dengan agama saya, lain halnya kemudian dalam segi eksternal itu selalu diperlakukan tidak sama jadi persoalannya disitu, jadi perlukan tidak sama itu yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, atau paradigma ketidaksetaraan yang berjenjang hirarki menghasilkan hak mayoritas dan minoritas. Jadi sekali lagi kalau hak asasi manusia dalam tataran ideal itu semua manusia itu punya hak yang sama. Kewajibannya sama yaitu kewajiban menghormati hak-hak orang lain sebagaimana orang lain menghormati hak saya. Terimakasih.

### **Moderator**

Makasih Pak MM Billah, cukup panjang dan sangat komprehensif. Baik saya tawarkan kepada hadirin apakah masih punya banyak pertanyaan sehingga kita akan buka termin baru. Ok baik masih ada silahkan Ibu, Bapak cukup 2 (dua) saja..

**Nur Azizah (Jurnal Perempuan)**

Saya ingin sharing aja yang sebelum saya ke Jurnal perempuan saya sempat hidup dan berkeseharian dengan anak dalem di Jambi, disana seperti apa yang dikatakan dari Bapak HTI tadi, sebenarnya mereka tidak menginginkan yang namanya kesejahteraan karena mereka menganggap hutan rimba itu adalah tempat hidup dan penghidupan mereka cukup sejahtera dari hutan tanpa gangguan dari UU konserfasi tanpa gangguan dari ilegal logging dan sebagainya. Namun kaitannya karena sekarang saya ternyata dari situ banyak sekali belajar dari mereka dimana sering saya keluar bareng masyarakat, bareng para perempuan-perempuan rimba itu, mereka bertelanjang dada, itu memang keseharian mereka dan itu memang baju yang menutupi norma-norma mereka, tapi saat mereka berhubnugan dengan kaum transmigrasi, atau berhubungan dengan orang luar, justru orang luar itulah yang menekankan normatif kepada mereka, dikasihlah dia kaos dan dikasihlah dia kebaya, dikasihlah dia jilbab yang saya sangat tidak setuju sekali meskipun saya sebagai orang Islam. Terus saya jadi ingat ke sini tentang Perda Syariah, dimana banyak mengharuskan kaum perempuan itu seperti yang dipadang harus pake jilbab, dan sebagainya. Aku teringat eh gila ya aku seperti perempuan hutan rimba yang dipaksa untuk pake jilbab, jadi kesannya kebijakan itu tadi yang menjadikan perempuan menjadi obyek dari kebijakan bukan subyek dan bukan menjadi salah satu pihak yang mentukan atau berpartisipasi dalam kebijakan itu, dan aku setuju dengan mbak Indri mungkin kita perlu mencari format kebijakan ramah terhadap masyarakat lokal juga terhadap masyarakat minoritas plus minoritas-minoritas yang lainnya lagi termasuk mas Toyo, juga perempuan juga mminoritas yang lainnya lagi.

### **Edi Saksono (perwakilan Depdagri)**

Ada dua hal yang baru terutama dari Pak Daniel tadi itu mengglitik sekali karena memang berbicara konsep minoritas ini itu harusnya dari sisi police harusnya lebih concern dari pemerintahnya dan hal yang sama yang harus kita kritisi itu adalah ini mbak Indri, sebenarnya kita secara perlahan sudah bergeser bahwa kita itu sekarang konsepnya memperhatikan hal-hal yang sebagian oleh sebagian publik itu dikatakan minoritas, padahal dikotomi ini tidak pernah diciptakan oleh pemerintah, tidak ada pemerintah di seluruh dunia yang mau menciptakan ini minoritas dan ini

mayoritas, konsep itu terbangun secara alamiah dan natural ketika sebuah kebutuhan dalam konteks yang mas HTI tadi katakan ekonomi karena berbicara keterbatasan karena scarcity tadi dia mengharuskan orang yang power dia punya hak itu dan dan yang tidak powerfull tidak punya hak itu, kita di Indonesia problem yang kita hadapai adalah kita tidak cermati adanya kelompok minoritas yang powerful dan ada kelompok minoritas yang powerless, ini kan persoalan, nah pemerintah sebenarnya menjembatani ini, tapi konsep waktunya ini memang lama, contoh yang menarik KTP itu, kita baru punya UU adminisrasi tentang kependudukan dan itu baru kemarin setelah 62 tahun Republik ini berdiri, tapi kalau kita cermati ke belakang apakah dengan hal yang minoritas tadi kita akan melegalkan dalam sebuah hak untuk kaum minoritas, lantas definisi minoritas itu akan mengkrucut juga bahwa pemerintah itu minoritas, ketika pemerintah itu tidak berdaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bayangkan kalau minoritas itu bersatu dan akumulasinya dalah sebuah kelompok mayoritas baru, oleh karena itu contoh yang paling detail tadi pak Billah sudah mengatakan dari sisi otonomi daerah itu terlihat sekali bagaimana kita mulai bergeser dri sisi sentralistik yang pak daniel katakan sekarang kita sudh ke desentralisasi konon yang terjadi apa, ketika kita lepas degnan sebuah konsep itu tidak semua daerah bisa, tahun ini ada sekita 16 daerah pemekaran baru konsep pemekaran ini dibangun juga dalam skala minoritas tadi pak, dalam konsep berpikir yang sma-sma becronnya karena minoritas tadi maka dia belah semua daerah-daerah itu ingin mempunyai sebuah konsep yang baru. Lantas apakah kita akan kelegalan ini dalam sebuah hak minoritas yang disitu juga dikatakan dilema negara bangsa, saya sependapat betul dengan pak Billah tadi harus hati-hati mencermati ini karna kalau kita tidak hati-hati maka satu-stunya negara yang berjaya di Republik ini yaitu **Netherland Indisch** , yang zaman itu dia bisa berdiri negaranya itu 352 tahun, majapahit hanya sekitar 150 tahun, Nusantara di bawah Sriwijaya agak lama 180 tahun, Mataram hanya 50 tahun, ke belakang Indonesia baru 62 tahun.

Saya sependapat pak Daniel, pak Daniel menguasai betul struktur teman-teman dari Belanda yang berpikir dengan konsep itu sehingga dia negara Hindia Belanda itu 352 tahun, dan itu dalam sejarah ini itu baru yang pertama, yang usianya terlama, selebihnya tidak ada mungkin kita tidak pernah yang melakukan survey itu.

Saya tergelitik juga dalam penelitian yang berikutnya yang ketiga mbak Indri kita punya hal yang minoritas berkurang karena dunia memaksakan itu, toh kita diharuskan meratifikasi coba mbak Indri cermati dalam sebulan kita harus meratifikasi perjanjian-perjanjian yang mau gak mau kita harus mengikuti itu, artinya apa kita tidak bisa hidup dalam konsep yang lebih minoritas tadi, kita dihadapkan pada suatu komunitas baru yang mengikutsertakan hak-hak mayoritas disitu, kita tidak berbicara hak-hak minoritas karena ketika kita masuk pada akumulasi itu kita menyebut diri kita hak-hak mayoritas, dan harus dicermati juga yang tadi dikatakan kenapa kita tidak berbicara perempuan dalam sisi yang lebih realistis. Contoh perempuan kita tidak akan pernah maju ketika tidak ada orang yang melawan mainstreaming itu, gender mainstreaming tidak dilawan ya perempuan tetap seperti itu, karena apa, kita maju karena melakukan reaksi ketika ada aksi yang lebih kencang dari kita, maka reaksi itu kita pupuk 2 kali lipat untuk menghantam aksi tadi. Kalau ini tidak diciptakan ini tidak bisa. Bangsa ini terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Struggle of life nya tumbuh ketika ada hantaman yang luar biasa dari luar baru kita naik *Struggel of life* minoritas pun begitu. Saya berterima kasih kepada teman-teman dari TIFA dan Interseksi memprakarsai ini, kalau tidak ada pertentangan yang luar biasa tidak ada *fed back*. Tapi jangan salah konsep mayoritas harus dijaga dan dipelihara, kemarin saya cermati betul beberapa perlawanan yang dilakukan oleh teman-teman yang sekarang akhirnya jenuh dan mereka kembali pada konsep berpikir oh ya ya dalam sebuah formulasi kenegaraan sampai ke titik mana sih kita akan berpikir itu, apakah kita akan tetap melegalkan hak-hak minoritas ini atau kita bungkus dengan sebuah kerangka hukum. Mbak indri tadi saya sudah katakan, saya tidak akan mereformasi kerangka hukum tidak, persoalan hukum di Republik atau dalam posisi police itu kita tidak perlu cari format, formatnya sudah jelas tadi sudah positif hukumnya, persoalannya implementasinya, dan yang kedua sosialisasi, kita banyak keterbatasan yang teman-teman mengatakan itu tugas pemerintah. Sekarang mulai bergeser pelan-pelan beberapa teman-teman menyadari itu dan ternyata tidak hanya tugas pemerintah ini tugas kita sama-sama, kedua ini dilegalkan juga dalam bentuk yang lebih jelas lagi bagaimana membungkus format tadi itu mbak maaf tidak hanya dalam konteks yang lebih parsial. Sehingga kalau berbicara implementasi kita lakukan di sisi itu dengan optimal.

Demikian juga untuk Ibu Thung saya berterima kasih ini memang pikiran baik, memang waktu itu sempat terpikirkan untuk pencantuman agama dan etnik dalam KTP sebelum UU itu jadi, tetapi saya lebih cenderung pada pemikiran Pak Billah itu boleh dicantumkan tetapi yang lebih ironis ketika kita tidak cantumkan itu tapi kiat tetapi dikotomikan orang itu, tetap ada pertanyaan karena berangkat dari sebuah niat untuk melakukan dikotomi, nah konsep ini yang harus kita mundurkan ke belakang. Untuk pak Daniel saya terimakasih untuk kritik yang membangun dan konstruktif.

## **Tanggapan**

### **Indri**

Secara sosiologis dia harus hidup, kemudian ada 2 atau 3 unsur yang lain. Kalau secara sosiologis itu artinya kalau dia tidak mencerminkan nilai norma dan rasa dari sosialitas itu maka dengan sendirinya dia tidak akan berlaku, dan wujudnya adalah misalnya bisa kegagalan, bisa kemudian ditangkap sebagai oh itu secara cepat misalnya yang sering muncul sekarang adalah oh itu problem implimentasi sebenarnya bukan soal substansi. Sebenarnya satu spirit yang saya suka dengan teman-teman Interseksi berkaitan dengan hukum tadi khususnya untuk saya bersyukur kalau mas Herry sebagai representasi Depdagri ada di sini, karena persis pada saat sekarang itu ada beberapa hukum positif yang mengatur itu ada di dua ranah ada di 2 instrumen dari pemerintah yaitu Depdagri dan Departemen Sosial. Yang memunculkan berbagai macam ketentuan dan regulasi yang keseluruhannya berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komunitas-komunitas yang bisa dikategorikan selagi kelompok minoritas itu, dan sayangnya beberapa ketentuan itu punya bias perspektif yang harus dikaji ulang, misalnya komunitas adat tertinggal, harus dikaji ulang misalnya komunitas adat tertinggal seolah-olah itu dibangun dari persepsi bahwa mereka itu sesuatu yang terasing dan terisolasi yang harus didisiplinkan dengan cara berpikir modern yang baru, dan pemerintah melalui regulasinya melalui produk hukumnya memfasilitasi proses-proses itu, menurut saya sudah saatnya berhenti untuk berpikir *taken for granted* bahwa struktur itu ada, seandainya ada memungkinkan ada forum seperti ini dimana semua elemen

masyarakat banyak ada, justru ruang diskusi itu harus dibuka untuk pertama kali adalah mempertanyakan struktur itu sendiri, jangan-jangan positifisme itu harus dikaji ulang, sejauhmana sebenarnya fleksibilitas pemerintah untuk memberikan ruang atas itu.

### **Moderator**

Mari kita berikan aplause untuk pembicara kita.

Hadirin sekalian mendiskusikan hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk membuat kesimpulan jadi kalau hadirin mau kesimpulan dari forum ini nanti bisa kirim email langsung ke [office@interseksi.org](mailto:office@interseksi.org). Jadi kesimpulannya sudah dibuat oleh Bung Hikmat Budiman dan kawan-kawan sehingga bisa memesan via email. Terimakasih atas semua kehadiran di forum yang sangat berharga ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih terlebih kepada 3 pembicara yang sangat luar biasa yang hadir di bersama kita. Waktu selanjutnya saya serahkan lagi ke Mbak Irine.

### **MC**

Terimakasih pada Bapak Tantan , sekali lagi saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Daniel, Ibu Thung Ju Lan dan Indri, MLM. serta semua hadirin yang telah bersedia mulai dari jam 12 sampai jam 4 makan siang bersama kami dan kemudian mendengarkan serta ikut terlibat dalam perdebatan di tingkat pemikiran mengenai isu-isu minoritas. Memang satu dua persoalan yang justru penting yang belum sempat dibahas di sini, tapi kami yakin akan ada forum lagi dimana inisiatif dari kita justru bisa lebih banyak memberikan sumbangsih bagi kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia, berkaitan dengan isu-isu minoritas ataupun multikulturalisme yang penting dari sudut pandang Bapak Ibu sekalian.

Penghargaan yang setingginya kepada seluruh panitia dari Interseksi termasuk yang memberikan buku Ibu Amel, Ibu Nia, Ibu Lisa dan kemudian dari kawan-kawan yayasan TIFA terutama kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kontribusinya supaya acara ini terselenggara dengan sukses, kepada para hadirin kami ucapkan terima kasih karna bersedia berpartisipasi dan dengan demikian kami akhiri

acara sore ini. Sekali lagi sebelum hadirin pulang jangan lupa memberikan undangan di bagian registrasi untuk ditukar dengan buku. Kami juga di Interseksi mempunyai diskusi rutin bulanan dan jika Bapak atau itu berminat menjadi participant kami mempunyai tema-tema yang secara rutin didownload di website kami yang tertera dalam rorus map Bapak- Ibu sekalian, terimakasih, selamat sore..

*Wasalamu'alaikum wr. Wb.*